

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA & SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS
SE-KOTA METRO LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

MIRANY

NPM 2321031031012



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH AKUNTABILITAS, KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA & SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BLUD PUSKESMAS
SE-KOTA METRO LAMPUNG**

Oleh

MIRANY

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

**Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia & Sistem
Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
BLUD Puskesmas Kota Metro Lampung
Oleh
Mirany**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan sistem informasi akuntansi (SIA) terhadap kualitas laporan keuangan pada BLUD Puskesmas se-Kota Metro Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah explanatory research dengan pendekatan kuantitatif, serta didukung data kualitatif dari wawancara singkat untuk memperkuat interpretasi hasil. Populasi penelitian adalah seluruh auditor internal BLUD Puskesmas di Kota Metro, dengan pengambilan sampel menggunakan teknik sensus. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($p\text{-value} = 0,220$), kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($p\text{-value} = 0,0001$), sedangkan Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($p\text{-value} = 0,861$). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,531 menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas, kompetensi SDM, dan SIA secara simultan mampu menjelaskan 53,1% variasi kualitas laporan keuangan. Temuan kualitatif dari wawancara dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa kompetensi SDM, terutama dalam memahami regulasi akuntansi dan mengikuti pelatihan teknis, menjadi faktor kunci peningkatan kualitas laporan. Di sisi lain, akuntabilitas organisasi sering terhambat oleh keterbatasan transparansi penggunaan dana dan konsistensi visi-misi, sedangkan pemanfaatan SIA masih belum optimal akibat rendahnya dukungan teknis dan kebiasaan kerja manual yang masih melekat. Simpulan penelitian ini adalah bahwa peningkatan kompetensi SDM memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas, sementara akuntabilitas dan SIA memerlukan penguatan sistem dan dukungan sumber daya agar dapat memberikan pengaruh yang lebih nyata. Rekomendasi bagi manajemen adalah memperkuat program pelatihan, meningkatkan transparansi pelaporan, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi akuntansi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi, Kualitas Laporan Keuangan, BLUD

ABSTRACT

The Influence of Accountability, Human Resource Competence, and Accounting Information Systems on the Quality of Financial Reports of BLUD Public Health Centers in Metro City, Lampung

**By
Mirany**

This study aims to analyze the influence of accountability, human resource (HR) competence, and accounting information systems (AIS) on the quality of financial reports at BLUD Public Health Centers (Puskesmas) in Metro City, Lampung. The research method used is explanatory research with a quantitative approach, supported by qualitative data from brief interviews to strengthen the interpretation of results. The population consists of all internal auditors of BLUD Puskesmas in Metro City, with samples taken using a census technique. Data were analyzed using Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS). The results show that accountability has a positive but insignificant effect on the quality of financial reports (p -value = 0.220), HR competence has a positive and significant effect (p -value = 0.0001), while AIS has a positive but insignificant effect (p -value = 0.861). The coefficient of determination (R^2) of 0.531 indicates that accountability, HR competence, and AIS simultaneously explain 53.1% of the variation in financial report quality. Qualitative findings from interviews with several informants reveal that HR competence—especially in understanding accounting regulations and participating in technical training—is a key factor in improving report quality. On the other hand, organizational accountability is often hindered by limited transparency in fund utilization and consistency in vision and mission, while AIS utilization remains suboptimal due to low technical support and persistent manual work habits. In conclusion, improving HR competence has a significant impact on the quality of financial reports of BLUD Puskesmas, while accountability and AIS require system strengthening and resource support to provide a more substantial effect. The study recommends that management strengthen training programs, enhance reporting transparency, and optimize the sustainable use of accounting information technology.

Keywords: accountability, HR competence, accounting information system, financial report quality, BLUD

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul tesis : **Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Kota Metro Lampung**

Nama Mahasiswa : **Mirany**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2321031012**

Program Studi : **Magister Ilmu Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi Dan Bisnis**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. NIP. 19710802 199512 2 001

Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D. NIP. 19820623 2008121 001

2. Ketua program Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, SE., M.Si., Akt.
NIP. 19750620 200012 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Fajar Gustlawaty Dewl, S.E., M.SI., Akt.

.....

Sekretaris : Plgo Naull, S.E., M.Sc., Ph.D.

.....

Penguji
Utama : Prof. Rindu Rika Camayuni, S.E., M.SI., Akt.

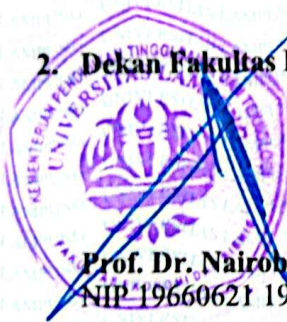
.....

Anggota : Chara Pratami T.Tubarad, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D.

.....

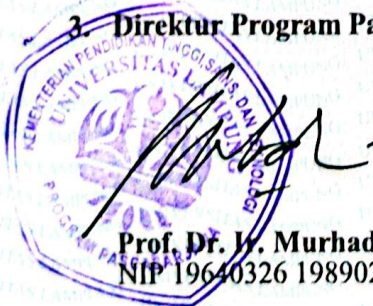


2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairohi, S.E., M.Si.
NIP.19660621 199003 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. Murhadi, M.Si.
NIP.19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 26 Agustus 2025

SURAT BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mirany

NPM : 2321031012

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Kota Metro Lampung” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam tesis ini tidak terdapat sebagian tulisan atau keseluruhan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, ... Agustus 2025



Mirany

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Metro pada tanggal 27 Januari 1980 dengan nama lengkap Mirany, anak kelima dari sembilan bersaudara, pasangan Bapak Zahit Ana Masyhur (Alm) dan Ibu Bahya.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 04 Metro Lampung, lulus tahun 1992.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 04 Metro Lampung, lulus tahun 1995.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Kartikatama I Metro Lampung, lulus tahun 1998.
4. Pendidikan Strata I di Universitas Muhammadiyah Metro Lampung, lulus tahun 2004.

Pada tahun 2023, penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam teriring semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan tesis ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang kepada:

Kelima orang tuaku tersayang, Ibu Bahya, Ibu Siti Romlah, Ibu Mesiyah, Bapak Zahit Ana Masyhur (Alm), dan Bapak Ngadimin. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan untuk menggapai cita-citaku.

Keempat kakakku, Mbak Yuni, Uni Mis, Abang Parhat, dan Kiay Prakash. Terima kasih atas dukungan penuh dan support luar biasa selama ini.

Keluarga kecilku, Musiani, Radies Ferari Koja, dan Nur Beauty Haq Putri Sakoja. Terima kasih telah memberikan support dan kekuatan dalam menyelesaikan studi ini.

Keempat adikku, Oktavia Sulistia Budi, Mahdi Setiawan, Rahmat Prasetyo, dan Nur Ganta. Perjuangan menuju cita-cita butuh banyak pengorbanan.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tiada henti.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul *“Pengaruh Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas se-Kota Metro Lampung”*, sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Akuntansi pada Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Proses penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, dorongan, bimbingan, serta bantuan moral dan material dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriania, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi, dan inspirasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak Pigo Nauli, S.E., M.Sc., Ph.D., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik, dan saran yang berharga bagi penulis.
7. Ibu Prof. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., Akt., selaku penguji utama yang telah memberikan arahan, kritik, saran, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Ibu Chara Pratami Tidespania Tubarad, S.E., M.Acc., Akt., Ph.D., selaku penguji kedua yang telah memberikan masukan, arahan, dan nasihat yang bermanfaat.

9. Ibu Dr. Liza, S.E., M.Si., Akt., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat, bantuan, dan dukungan selama ini.
10. Seluruh dosen Program Studi Magister Ilmu Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, atas ilmu dan pembelajaran yang berharga selama perkuliahan.
11. Staf akademik, administrasi, tata usaha, pegawai, dan staf keamanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan terbaik.
12. Sahabat-sahabat tercinta: Agustien, Resti, Adien, Zima, Martha, Alit, Devi, Bunga, Elis, Irma, Uti, Ayi, Muhtarom, Alvis, Daniel, Nanak, dan Rio, atas bantuan, semangat, motivasi, dan doa.
13. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Akuntansi 2023, atas kebaikan, bantuan, wawasan, serta kebersamaan selama perkuliahan.

Atas semua bantuan dan dukungan tersebut, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga tesis ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi semua pembaca.

Bandar Lampung, 25 Agustus 2025
Penulis

Mirany
NPM. 2321031012

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SURAT BEBAS PLAGIARISME	v
RIWAYAT HIDUP	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang dan Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Umum:	9
1.3.2 Tujuan Khusus:	9
1.4 Batasan Penelitian	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 <i>Teory Agency</i>	11
2.1.2 <i>Teori Stewardship</i>	11
2.1.3 Pendekatan Multi-Teori dalam Kualitas Pelaporan	11
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan	12
2.1.5 Akuntabilitas	14
2.1.6 Kompetensi SDM	16
2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi	18
2.1.8 Laporan Keuangan	23
2.2 Pengembangan Hipotesis	26
2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas	26
2.2.2 Pengaruh Kompetensi SDM	29
2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi	34
2.3 Kerangka Penelitian	38
 BAB III METODE PENELITIAN	 39
3.1 Populasi dan Sampel	39
3.2 Jenis dan Sumber Data	40
3.3 Metode Pengumpulan Data	40

3.4	Definisi Operasional.....	42
3.5	Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....		54
4.1	Deskripsi Data dan Responden.....	54
4.2	Analisis Deskriptif	55
4.2.1	Profil Responden.....	56
4.2.2	Analisis Statistik Deskriptif.....	57
4.3	Analisis Outer Model	58
4.3.1	Uji Validitas.....	58
4.3.2	Uji Reliabilitas	63
4.4	Analisis <i>Inner Model</i>	64
4.4.1	Nilai <i>R Square</i>	64
4.4.2	Nilai <i>F Square</i>	65
4.4.3	Uji Model Fit (<i>Goodness of Fit</i>)	65
4.5	Pengujian Model Struktural.....	66
4.5.1	<i>Path Coefficient</i>	66
4.5.2	<i>Coefficient Determinant</i> (R^2).....	69
4.6	Analisa Data (Kualitatif)	69
4.7	Pembahasan	75
BAB V PENUTUP		82
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Implikasi	83
5.3	Keterbatasan Penelitian	83
5.4	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Tenaga Akuntansi Puskesmas Kota Metro	4
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	45
Tabel 3.2 Kuesioner Penelitian.....	47
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas	51
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan/Pekerjaan.....	55
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Jabatan	56
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif.....	57
Tabel 4.4 Indikator Final Penelitian dan Nilai Outer Loading	59
Tabel 4.4 <i>Outer Loading (Loading Factor)</i> Indikator	60
Tabel 4.5 AVE (<i>Average Variance Extracted</i>).....	61
Tabel 4.6 Nilai <i>Cross Loading</i>	62
Tabel 4.7 <i>Fornell – Larcker Criterion</i>	62
Tabel 4.8 <i>Composite Reliability dan Cronbach Alpha</i>	63
Tabel 4.9 <i>R-square</i>	64
Tabel 4.10 <i>F-square</i>	64
Tabel 4.11 Model Fit (<i>Goodness of Fit</i>)	65
Tabel 4.12 Hasil Uji <i>Path Coefficient</i>	66
Tabel 4.13 <i>Coefficient Determinant (R²)</i>	68
Tabel 4.14 Triangulasi Data Kuantitatif dan Kualitatif	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian.....	38
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BLUD.....	55
Gambar 4. 2 Output smartPLS untuk loading factor	61
Gambar 4. 3 Output SEM PLS	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Izin Penelitian	89
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian	90
Lampiran 3 Panduan Wawancara Kualitatif	93
Lampiran 4 Tabulasi Data Pilot Test	96
Lampiran 5 Tabulasi Data SmartPLS	98
Lampiran 6 Tabulasi Data Valid (SmartPLS)	100
Lampiran 7 Hasil Pengolahan Data Pilot Study (SPSS)	101
Lampiran 8 Distribusi Jawaban Responden Terhadap Variabel Penelitian	112
Lampiran 9 Pengolahan Data SmartPLS.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Pelaporan keuangan yang efektif termasuk elemen krusial dalam tata kelola keuangan sektor publik, terutama dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan anggaran yang efisien. Organisasi sektor publik di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam memastikan penyajian laporan keuangan yang akurat dan disampaikan secara tepat waktu, terutama di tingkat layanan kesehatan primer seperti Puskesmas. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan, Salah satunya yaitu kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dalam proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Secara global, efektivitas pelaporan keuangan di sektor publik masih menghadapi berbagai tantangan.

Menurut laporan International Federation of Accountants IFAC.(2022), kurangnya tenaga akuntansi profesional dalam sektor publik menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kualitas laporan keuangan di banyak negara berkembang. Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi yang belum optimal dan keterbatasan SDM dalam memahami regulasi keuangan juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Isu mengenai rendahnya kualitas laporan keuangan di sektor publik Indonesia juga menjadi sorotan nasional. Berdasarkan berbagai pemberitaan dan laporan hasil pemeriksaan BPK, beberapa instansi Pemerintah Daerah masih menghadapi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi dan keuangan (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023).

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dibentuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan.2023). Tujuan dari SIMDA yaitu untuk membantu Pemerintah Daerah menyusun laporan keuangan agar lebih akurat dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Meskipun demikian, dalam implementasinya, berbagai tantangan masih ditemukan, terutama terkait dengan keterbatasan kompetensi SDM dalam mengoperasikan sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam regulasi dan sistem pelaporan seperti SAP dan SIPD, implementasinya masih belum optimal secara nasional.

Penelitian oleh Tran.(2020) mengungkapkan bahwa akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan efektivitas lembaga publik. Artinya, organisasi yang memiliki sistem akuntabilitas baik cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan meningkatkan kepercayaan publik. Demikian pula, dalam penelitian lanjutan menurut Tran et al.(2021), ditemukan bahwa kompetensi akuntansi dan kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelaporan keuangan di sektor publik.

Di tingkat Provinsi, kualitas laporan keuangan juga masih menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tahun 2023, masih terdapat beberapa catatan penting dari BPK terkait ketidaksesuaian dalam pencatatan aset tetap serta lemahnya pengawasan terhadap belanja barang. Meskipun demikian, Kota Metro tercatat sebagai salah satu daerah dengan realisasi anggaran tertinggi, yaitu 42,24% pada triwulan II tahun 2023 (Pemda Kota Metro.2023). Namun, tingginya realisasi anggaran belum tentu mencerminkan laporan keuangan dengan kualitas yang baik apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten dan sistem pelaporan yang akuntabel. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik.(2023) menunjukkan bahwa sekitar 60% tenaga administrasi keuangan di fasilitas layanan kesehatan daerah masih diisi oleh tenaga honorer atau pegawai non-PNS yang belum memiliki latar belakang akuntansi yang memadai. Khususnya di daerah Kota Metro, posisi tenaga administrasi yang menangani keuangan masih banyak diisi oleh tenaga kesehatan. Hal ini terkait dengan masih kurangnya SDM

di bidang keuangan dan perekonomian, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan efektivitas pelaporan keuangan di Puskesmas dan instansi kesehatan lainnya.

Lebih lanjut, permasalahan khusus di Kota Metro juga menjadi perhatian.

Berdasarkan data internal Dinas Kesehatan dan hasil studi pendahuluan, diketahui bahwa sejak tahun 2020 hingga 2024, laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kota Metro belum pernah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Padahal pada tahun 2019, seluruh Puskesmas di Kota Metro sempat menjalani audit eksternal oleh KAP. Tidak adanya audit independen selama lima tahun terakhir menyebabkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih diragukan, baik dari sisi akurasi maupun kepatuhannya terhadap SAP. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik di sektor kesehatan. Secara regional Provinsi Lampung, khususnya Kota Metro, juga menghadapi tantangan serupa, penting untuk menyoroti bahwa kompetensi SDM dan implementasi sistem informasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di tingkat puskesmas.

Berdasarkan laporan keuangan daerah dan hasil audit oleh Pemda Metro, mayoritas tenaga yang menangani pelaporan keuangan atau bendahara di Puskesmas dipegang oleh PNS dengan latar belakang pendidikan kesehatan. Pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh tenaga honorer dengan berbagai latar pendidikan, dan sering kali tidak terkait dengan akuntansi serta keuangan. Hal ini menyebabkan berbagai kendala dalam pengoperasian SIMDA, termasuk keterlambatan pelaporan, kesalahan dalam pencatatan transaksi, serta ketidaksesuaian dengan regulasi keuangan yang berlaku (Pemda Kota Metro.2023).

Tabel 1.1 Tenaga Akuntansi Puskesmas Kota Metro

No	Nama Puskesmas	Bendahara BLUD	Tenaga Akuntansi (Kontrak BLUD)	Latar Belakang Pendidikan
1	Puskesmas Margorejo	1 orang	1 orang	D3 Kebidanan
2	Puskesmas Ganjar Agung	1 orang	1 orang	D4 Profesi Bidan
3	Puskesmas Karangrejo	1 orang	1 orang	D3 Kebidanan
4	Puskesmas Mulyojati	1 orang	1 orang	D3 Farmasi
5	Puskesmas Yosomulyo	1 orang	1 orang	
6	Puskesmas Yosodadi	1 orang	1 orang	S1 Kedokteran Gigi
7	Puskesmas Iringmulyo	1 orang	-	SI Keperawatan
8	Puskesmas Banjarsari	1 orang	-	SI Profesi Apoteker
9	Puskesmas Metro	1 orang	-	D3 Kebidanan
10	Puskesmas Tejoagung	1 orang	-	D4 Teknologi Laboratorium Medis
11	Puskesmas Purwosari	1 orang	1 orang	D3 Keperawatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Metro, 2025

Berdasarkan hasil inventarisasi tenaga keuangan di 11 Puskesmas Kota Metro, mencerminkan bahwa penyusunan laporan keuangan BLUD di masing-masing Puskesmas dilaksanakan oleh Bendahara BLUD yang telah ditetapkan, dengan dukungan dari tenaga akuntansi kontrak BLUD di beberapa Puskesmas. Peran bendahara menjadi sentral dalam proses pencatatan, pelaporan, hingga penyusunan laporan keuangan, sementara tenaga akuntansi kontrak berfungsi membantu dalam aspek teknis pencatatan dan penyusunan laporan sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual.

Namun demikian, jika ditinjau dari latar belakang pendidikan para tenaga tersebut, sebagian besar tidak berasal dari rumpun ilmu ekonomi atau akuntansi,

melainkan dari bidang kesehatan seperti D3 Kebidanan, D4 Profesi Bidan, D3 Farmasi, S1 Keperawatan, D4 Teknologi Laboratorium Medis, dan S1 Profesi Apoteker. Hanya sebagian kecil dari Puskesmas yang belum memiliki tenaga akuntansi kontrak (seperti Puskesmas Iringmulyo, Banjarsari, Metro, dan Tejoagung), yang artinya beban penyusunan laporan keuangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab bendahara.

Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa di Puskesmas Kota Metro terdapat 11 bendahara yang seluruhnya berasal dari tenaga PNS kesehatan, tanpa adanya tenaga akuntansi dari PNS atau PPPK. Pada tahun 2023, tenaga pembantu bendahara BLUD dan penyusun keuangan di 4 Puskesmas berasal dari latar belakang akuntansi. Pada tahun 2024, jumlah Puskesmas dengan tenaga akuntansi meningkat menjadi 7 Puskesmas. Namun, tenaga akuntansi yang tersedia hanya berstatus kontrak atau honorer, bukan pegawai tetap. Berdasarkan data terbaru, tenaga akuntansi berstatus kontrak BLUD saat ini terdapat di tujuh Puskesmas, yaitu Puskesmas Margorejo, Ganjar Agung, Karangrejo, Mulyojati, Yosomulyo, Purwosari dan Yosodadi. Sementara itu, Puskesmas Iringmulyo, Banjarsari, Metro dan Tejoagung belum memiliki tenaga akuntansi, baik yang berstatus kontrak maupun honorer. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah model reformasi dalam sistem pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang diarahkan untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, serta mutu pelayanan kepada masyarakat. Konsep BLUD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana konsep ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan kepada unit pelaksana teknis di bidang pelayanan, seperti Rumah Sakit, Puskesmas, dan instansi layanan lainnya. Melalui status BLUD, unit layanan tersebut dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan layaknya entitas bisnis, namun tetap berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, BLUD diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme anggaran tradisional.

Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang kini banyak bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sebuah bentuk

dalam pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Penerapan BLUD memungkinkan Puskesmas mengelola anggarannya secara mandiri, termasuk dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Dengan status BLUD, Puskesmas diwajibkan menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip akuntabilitas tinggi karena dana yang dikelola bersumber dari APBD dan penerimaan layanan.

Namun demikian, implementasi BLUD dalam sektor kesehatan, khususnya di Kota Metro, masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu isu yang mencolok adalah rendahnya kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang keuangan, terutama di kalangan tenaga pengelola keuangan di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Terbatasnya jumlah akuntan profesional berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, yang memiliki peran krusial dalam tata kelola keuangan daerah. Oleh karena itu, evaluasi mengenai kompetensi Sumber Daya Manusia menjadi hal yang penting untuk memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan sistem dapat berfungsi secara maksimal.

Proses penyusunan laporan keuangan di Puskesmas hingga kini masih dikerjakan secara manual. Data yang diolah untuk menghasilkan laporan keuangan tersebut merupakan output dari SIMDA. Proses penyusunan laporan keuangan manual ini terpaksa dilakukan karena laporan keuangan di SIMDA tidak dapat dicetak. Hal ini disebabkan oleh kendala dalam entri data penyesuaian dan data pendukung lainnya yang membentuk laporan keuangan, yang hanya bisa diakses oleh Dinas Kesehatan Kota Metro. Sebagai akibatnya, data dari Puskesmas hanya terinput secara global di Dinas Kesehatan. Kondisi ini menyebabkan output laporan keuangan Puskesmas tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, sehingga Puskesmas harus menyusun laporan keuangan secara manual dengan menggunakan output dari SIMDA yang dilengkapi dengan penyesuaian dari data yang ada di puskesmas. Proses ini menghasilkan laporan keuangan BLUD Puskesmas yang lebih akurat. Kondisi ini menyoroti pentingnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas dalam proses penyusunan laporan

keuangan agar kualitas laporan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar laporan keuangan dalam organisasi sektor publik, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di bidang kesehatan, diukur berdasarkan beberapa komponen utama, yaitu akuntabilitas, relevansi, transparansi, konsistensi, keterbandingan, keandalan, dan kelengkapan. Komponen-komponen ini menjadi indikator dalam menilai sejauh mana laporan keuangan mampu menggambarkan keadaan finansial yang sebenarnya serta mendukung akuntabilitas dan transparansi organisasi. Sebagai bagian dari BLUD, Puskesmas memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang efektif. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti akuntabilitas, kompetensi Sumber Daya Manusia, serta Sistem Informasi Akuntansi yang memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan.

Menurut Tran et al.(2020) kapasitas akuntansi dan kepemimpinan berpengaruh terhadap akuntabilitas melalui kualitas laporan keuangan di organisasi publik Vietnam. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan organisasi. Menurut Tran et al.(2020) akuntabilitas memiliki peranan penting dalam menentukan keterkaitan antara kualitas pelaporan keuangan dengan kinerja organisasi publik. Artinya, organisasi yang memiliki sistem akuntabilitas yang baik cenderung menyajikan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik.

Kompetensi SDM juga menjadi faktor krusial dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Menurut Susena et al.(2020) Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal dan kompetensi Sumber Daya Manusia, dengan pemanfaatan teknologi informasi berperan sebagai variabel moderasi. Dalam konteks Puskesmas sebagai BLUD, kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang akuntansi dan manajemen keuangan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kompetensi SDM yang dimiliki dalam pengelolaan keuangan BLUD akan berpengaruh terhadap akuntabilitas dari laporan keuangan yang di sajikan, sehingga hal ini menjadikan

akuntabilitas menarik untuk dijadikan variabel dalam penelitian ini. Selain itu, komitmen organisasi terhadap transparansi dan akuntabilitas berperan signifikan dalam menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan. Al-Shaer et al. (2020) menemukan bahwa kualitas laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pasca-audit di Inggris. Studi ini menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal.

Tidak hanya di tingkat pusat, persoalan kualitas laporan keuangan juga tercermin di berbagai wilayah di Indonesia, mencakup tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Meskipun pemerintah daerah di berbagai provinsi telah berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangan, tantangan masih sering ditemukan di tingkat kota maupun kabupaten. Berdasarkan laporan Kompas, Pemprov DKI Jakarta menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK akibat temuan sebesar Rp 2,16 triliun, yang meliputi defisit daerah Rp 442 miliar serta potensi kerugian hingga Rp 1,71 triliun (Kurnia et al. 2015). Di Kalimantan Tengah, dua pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya, juga menerima opini WDP karena lemahnya sistem pengendalian internal dan laporan keuangan yang belum memenuhi standar regulasi (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2023). Bahkan di Jawa Barat, tiga daerah gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena permasalahan serupa (Reni et al. 2019).

Kondisi ini mencerminkan bahwa persoalan kualitas laporan keuangan bukan hanya terjadi di tingkat pusat atau provinsi, tetapi juga menjadi masalah nyata di tingkat kota dan kabupaten, termasuk di wilayah seperti Kota Metro. Dengan demikian, penelitian mengenai pengaruh akuntabilitas, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas di Kota Metro menjadi penting dilakukan agar dapat memberikan kontribusi perbaikan pada tata kelola keuangan sektor publik di daerah.

Berdasarkan berbagai temuan penelitian tersebut, tujuan kajian ini adalah untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas kompetensi SDM dan Sistem Informasi

Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD kesehatan di Puskesmas Kota Metro, Lampung. Penetapan Kota Metro sebagai Lokasi didasari oleh keterlibatan peneliti sebagai pemegang laporan konsolidasi keuangan Dinas Kesehatan, sehingga memiliki akses dan pemahaman langsung terhadap tantangan akuntabilitas dan kompetensi SDM Puskesmas. Penelitian ini memiliki keunikan karena memadukan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixed-method*) di wilayah dengan keterbatasan SDM akuntansi, serta belum banyak dijadikan lokasi penelitian terdahulu.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung?
2. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum:

Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung.

1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung.
2. Menganalisis pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung.
3. Menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD kesehatan Puskesmas Se-Kota Metro, Lampung.

1.4 Batasan Penelitian

1. BLUD Kesehatan di kota Metro terdiri dari 2 yaitu BLUD Rumah Sakit dan Puskesmas, dan objek penelitian dibatasi pada Puskesmas Se-Kota Metro yang berstatus BLUD.
2. Variabel yang diteliti meliputi akuntabilitas, kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa laporan keuangan BLUD yang tersedia.
4. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun (2024).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teory *Agency*

Teori Keagenan menjelaskan keterkaitan atau hubungan antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (Kepala Puskesmas) dalam konteks pengelolaan sumber daya. Torres et al. (2021) menyebutkan bahwa dalam sektor publik, adanya perbedaan informasi (asimetri informasi) antara pemerintah dan masyarakat menciptakan potensi moral hazard. Dalam teori ini, pelaporan keuangan menjadi sarana untuk mengurangi asimetri informasi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Namun, terdapat risiko manipulasi laporan untuk kepentingan pribadi atau politik, karena agen memiliki kendali lebih besar terhadap informasi dibandingkan *principal*.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Sebagai pelengkap teori keagenan, teori *Stewardship* menyoroti bahwa Kepala Puskesmas tidak selalu bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan juga berperan sebagai *Steward* yang mengutamakan kepentingan organisasi (Torres et al. 2021). Motivasi sosial seperti keinginan memperbaiki layanan publik dan mempertahankan reputasi organisasi menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaporan. Dalam teori ini, transparansi dipandang sebagai bentuk akuntabilitas intrinsik, bukan hanya sebagai kewajiban formal, melainkan sebagai bagian dari komitmen moral kepada masyarakat.

2.1.3 Pendekatan Multi-Teori dalam Kualitas Pelaporan

Torres et al. (2021) mengusulkan pendekatan multi-teori dalam mengevaluasi kualitas pelaporan keuangan. Mereka mengidentifikasi dua aspek penting: aspek *conformance*, yang berkaitan dengan pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban melalui penyajian laporan keuangan yang andal; serta aspek *performance*, yang berhubungan dengan pembuatan strategi dan kebijakan

organisasi guna mencapai tujuan layanan publik. Pendekatan ini memberi pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap praktik pelaporan sektor publik.

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan mencerminkan tingkat kemampuan laporan tersebut dalam menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengguna sebagai dasar pengambilan keputusan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Menurut Torres et al. (2021), dalam sektor publik, laporan keuangan berkualitas tinggi menjadi alat penting untuk memastikan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Laporan yang berkualitas mampu mencerminkan kondisi keuangan secara jujur, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi risiko kesalahan interpretasi dan manipulasi informasi.

Kualitas laporan keuangan mencerminkan seberapa baik informasi yang disajikan dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan yang tepat. Tran et al. (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas ditandai dengan karakteristik relevan, terpercaya, dapat diperbandingkan, serta mudah dipahami.

Laporan keuangan dianggap relevan apabila informasi yang disajikan mampu memengaruhi keputusan ekonomi para pengguna melalui penyediaan data yang bermakna serta disampaikan tepat waktu.

Keandalan dan Keterbandingan: menurut Jatmiko et al. (2020) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang andal dan dapat dibandingkan antar periode serta antar entitas memungkinkan evaluasi kinerja keuangan secara lebih objektif.

Penyajian dan Aksesibilitas Informasi: menurut Torres et al. (2021) menyatakan bahwa aksesibilitas informasi melalui saluran online, serta penyajian yang jelas dan terstruktur, meningkatkan kualitas laporan dan mendukung transparansi organisasi publik.

2.1.4.1 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan (Transparansi, Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami & Lengkap)

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karakteristik kualitas laporan keuangan mencakup enam aspek utama. Transparans, Relevan, Andal, Dapat Dibandingkan, Dapat Dipahami dan Lengkap. Transparansi merujuk pada laporan keuangan yang dimana tidak hanya menyajikan informasi yang benar, tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh publik, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Relevansi menandakan bahwa informasi yang diberikan harus memiliki kapasitas untuk memengaruhi pilihan pengguna dengan membantu pemahaman kejadian masa lalu untuk pengambilan keputusan, masa kini, atau masa depan. Keandalan menunjukkan bahwa informasi bebas dari kesalahan material dan bias, serta dapat dipercaya sebagai penyajian yang benar dari kenyataan. Dapat dibandingkan berarti laporan keuangan harus memungkinkan pengguna untuk membandingkan kinerja entitas dari waktu ke waktu dan antar entitas serupa. Dapat dipahami mengacu pada penyajian informasi yang sederhana dan jelas sehingga dapat dengan mudah dimengerti oleh para pengguna laporan. Lengkap yakni menyajikan seluruh informasi material yang dibutuhkan tanpa ada yang ditutupi, karena kelalaian dalam penyajian dapat menyesatkan pengguna.

2.1.4.2 Standar Penyusunan Laporan Keuangan BLUD

Dalam konteks penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di dasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sedangkan untuk pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. BLUD wajib menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual dan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pada BLUD mencakup beberapa komponen utama, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, relevansi, keandalan,

mudah dipahami & lengkap serta memperlihatkan kinerja pengelolaan keuangan BLUD kepada Stakeholder.

2.1.4.3 Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah

2.1.4.3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan temuan Torres et al.(2021), ada sejumlah faktor utama yang berperan dalam menentukan mutu laporan keuangan pada instansi pemerintahan. Pertama, karakteristik *governing body*, seperti ukuran dewan yang lebih besar dan proporsi anggota independen yang tinggi, berhubungan positif dengan kualitas laporan keuangan. Kedua, kinerja keuangan, di mana entitas dengan hasil keuangan yang positif cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih baik, karena adanya tekanan untuk memenuhi standar defisit yang ditetapkan *Eurostat*. Ketiga, fitur organisasional, seperti ukuran organisasi yang lebih besar dan penerapan standar akuntansi berbasis sektor publik, juga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan.

2.1.4.3.2 Hubungan Kualitas Pelaporan dan Transparansi

Penelitian Torres et al.(2021) mengindikasikan adanya keterkaitan positif antara mutu pelaporan dengan sejauh mana informasi dipublikasikan secara online. Entitas yang menyajikan laporan keuangan berkualitas tinggi cenderung memberikan lebih banyak informasi yang komprehensif melalui platform digital, sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Akuntabilitas dalam sektor publik, menurut mereka, merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya mencakup jumlah informasi yang disampaikan, tetapi juga kualitas, relevansi, dan keandalannya dalam membangun kepercayaan masyarakat.

2.1.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang menunjukkan sejauh mana suatu organisasi dapat dipertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakannya kepada pemangku kepentingan. Tran et al.(2020) menekankan bahwa akuntabilitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja organisasi publik.

Pertanggungjawaban Organisasi Publik: akuntabilitas terkait erat dengan sistem pengelolaan organisasi publik, termasuk pengelolaan informasi dan prosedur administrasi yang memungkinkan pengambilan keputusan yang transparan dan bertanggung jawab.

Efektivitas Pelaporan: efektivitas pelaporan merupakan salah satu cara akuntabilitas diwujudkan, dengan fokus pada penyusunan program yang selaras dengan tujuan organisasi serta perencanaan anggaran yang tepat.

Transparansi Penggunaan Dana: transparansi dalam penggunaan dana publik adalah elemen penting dari akuntabilitas, di mana informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat memperkuat kepercayaan publik dan kualitas pelaporan keuangan.

Istilah akuntabilitas berasal dari kata bahasa Inggris *accountability*, yang merujuk pada kondisi atau keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, akuntabilitas dipahami sebagai situasi di mana suatu tindakan atau keputusan dapat diminta pertanggungjawaban. Secara prinsip, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban menyampaikan informasi serta mengungkapkan (*disclosure*) aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Purba et al. 2018).

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan instansi pemerintah juga diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang memberikan pedoman dan aturan dalam penerapan standar akuntansi oleh pemerintah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Demikian pula, PP No. 71 Tahun 2003 tentang Prinsip-Prinsip Akuntansi Pemerintahan mengatur prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan sektor publik. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, setiap organisasi sektor publik memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup: 1) hak untuk memperoleh pengetahuan (*right to know*), 2) hak untuk menerima informasi (*right to be informed*), serta 3) hak untuk

menyampaikan dan mendapatkan perhatian atas aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Wiguna et al. 2020).

Gagasan mengenai akuntabilitas muncul dari pandangan bahwa setiap aktivitas wajib dipertanggungjawabkan kepada pihak atau lembaga yang memberikan wewenang dalam pelaksanaan suatu program (Ismawati et al. 2019). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup ketersediaan dan kemudahan akses laporan tersebut bagi para pengguna. Semakin terbuka akses masyarakat terhadap laporan keuangan, semakin besar pula tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dalam mengelola keuangan. Selain itu, akuntabilitas juga dapat ditingkatkan melalui kompetensi aparatur pemerintah, khususnya pada Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan (Maria et al. 2020).

Akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah berperan penting sebagai tolok ukur kinerja Pemerintah Daerah, dimana hasil pertanggungjawaban laporan keuangan memiliki pengaruh yang besar dalam menilai baik buruknya kinerja pemerintah. Semakin akuntabel tingkat pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula tingkat pencapaian kinerja pemerintah (Purnama et al. 2016). Ketidakpastian hukum, kondisi politik yang tidak stabil, serta arah dan kebijakan pembangunan yang belum jelas menjadi hambatan utama. Evaluasi kinerja keuangan memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas. Untuk memperkuat mekanisme akuntabilitas, dibutuhkan sistem manajemen kinerja keuangan yang mencakup indikator serta target kinerja. Selain itu, pelaporan kinerja keuangan perlu disertai dengan penerapan mekanisme penghargaan dan sanksi. “Indikator pengukuran kinerja keuangan yang baik mempunyai karakteristik *relevant, unambiguous, cost-effective*, dan *simple*, serta berfungsi sebagai sinyal yang menunjukkan bahwa terdapat masalah yang memerlukan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut” (Nasution et al. 2019).

2.1.6 Kompetensi SDM

Kompetensi SDM merupakan seperangkat karakteristik pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang membuat seseorang menjalankan pekerjaannya

secara efektif dan efisien. kompetensi akuntansi memiliki pengaruh langsung pada kualitas laporan keuangan dalam sektor publik. *Knowledge* (Pengetahuan): Pengetahuan tentang peraturan dan sistem pelaporan menjadi dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan sesuai standar. kapasitas akuntansi yang baik berdampak positif terhadap kualitas pelaporan. *Skill* (Keterampilan): menjelaskan bahwa keterampilan teknis dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan diperlukan untuk menjamin akurasi dan keandalan informasi keuangan yang disajikan oleh instansi publik. *Attitude* (Sikap Profesional): menunjukkan bahwa sikap profesional, termasuk integritas dan etika, mendukung pelaporan keuangan yang andal. Sikap ini mencerminkan budaya organisasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas (Avishek Bhandari et al. 2021; Jatmiko et al. 2020).

Kompetensi SDM mengacu pada kombinasi keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang dibutuhkan individu untuk menjalankan tugasnya secara efektif (Spencer et al. 1993). Menurut McClelland et al. (1973) kompetensi merupakan karakteristik mendasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja di tempat kerja. Kompetensi SDM dalam konteks keuangan publik mencakup pemahaman tentang regulasi, keterampilan teknis akuntansi, dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan seperti Sistem Informasi Dan Manajemen Daerah/SIMDA (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023).

2.1.6.1 Tujuan Kompetensi Manusia

Kompetensi SDM ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja baik pada tingkat individu maupun pada level organisasi secara menyeluruh. Menurut Armstrong et al. (2014), kompetensi bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
2. Memastikan pemenuhan standar profesional.
3. Meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi dan regulasi.
4. Mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Dalam konteks pelaporan keuangan, SDM yang kompeten dapat memastikan pencatatan transaksi yang akurat, kepatuhan terhadap regulasi, dan pemanfaatan sistem informasi keuangan yang optimal (Yunita et al. 2023).

2.1.6.2 Tipe Kompetensi Sumber Daya Manusia

Boyatzis et al. (1982) menyatakan bahwa terdapat klasifikasi kompetensi SDM dalam beberapa kategori, antara lain:

1. Kompetensi Teknis: Kemampuan dalam bidang spesifik, seperti akuntansi dan pengelolaan keuangan.
2. Kompetensi Manajerial: Kemampuan dalam mengelola tim dan pengambilan keputusan.
3. Kompetensi Sosial: Kemampuan dalam komunikasi dan kerja sama tim.
4. Kompetensi Personal: Sikap profesionalisme, etika, dan motivasi kerja.

Dalam implementasi SIMDA, kompetensi teknis menjadi faktor utama dalam efektivitas pelaporan keuangan (Anggraini et al. 2024).

2.1.6.3 Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia

Menurut Spencer et al. (1993), karakteristik utama kompetensi SDM meliputi:

1. Pengetahuan: Pemahaman mengenai regulasi dan prosedur akuntansi.
2. Keterampilan: Kemampuan dalam menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti SIMDA.
3. Sikap dan Nilai: Etika kerja dan kepatuhan terhadap standar pelaporan keuangan.

SDM yang memiliki karakteristik tersebut lebih mampu dalam mengelola keuangan publik secara akurat dan transparan (Shafwan et al. 2023).

2.1.7 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) adalah sebuah mekanisme yang dibangun untuk menghimpun, memproses, serta menyajikan data keuangan dengan cara yang terstruktur. Penggunaan SIA yang efektif berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akurasi laporan keuangan.

Performance Expectancy: sistem akuntansi biaya mampu memperkuat keterbukaan informasi serta meningkatkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan pada sektor kesehatan di Kenya. *Effort Expectancy*: dalam mengoperasikan Sistem Informasi Akuntansi meningkatkan penggunaan sistem tersebut, yang berujung pada pelaporan keuangan yang lebih akurat. *Social Influence*: pentingnya pengaruh sosial dan dukungan dari pimpinan dan lingkungan kerja dalam mendorong penggunaan sistem akuntansi yang modern. *Facilitating Conditions*: Dukungan teknis dan infrastruktur yang memadai menjadi syarat penting bagi keberhasilan implementasi Sistem Informasi Akuntansi. *Behavioral Intention*: niat pengguna untuk terus menggunakan sistem akuntansi ditentukan oleh persepsi mereka terhadap kemudahan dan manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut (Chugh et al. 2024; Kihuba et al. 2016; Teoh et al. 2024). Menurut TMBooks (2017), Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu mekanisme yang berfungsi untuk menghimpun, mencatat, menyimpan, serta mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membuat keputusan (Hidayat et al. 2021). Menurut Romney et al. (2022) Sistem Informasi Akuntansi dapat dipahami sebagai sistem yang dirancang untuk menghimpun, mencatat, menyimpan, dan memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak pengambil keputusan. Komponen di dalamnya mencakup Sumber Daya Manusia, prosedur serta instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, mekanisme pengendalian internal, hingga prosedur keamanan.

Menurut Turner & Copeland (2017) Sistem Informasi Akuntansi mencakup serangkaian proses, prosedur, dan mekanisme yang berfungsi untuk menangkap data akuntansi dari aktivitas bisnis, mencatatnya ke dalam catatan yang relevan, serta mengolah data tersebut secara rinci melalui pengklasifikasian, meringkas dan mengkonsolidasikan serta melaporkan data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal maupun eksternal.

Dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dapat menghasilkan informasi dengan melakukan kegiatan dalam bentuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses sampai menghasilkan sebuah

laporan data akuntansi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk mengambil keputusan baik pengguna internal maupun eksternal.

2.1.7.1 Komponen Sistem Informasi

Menurut Romney et al. (2022) Sistem Informasi Akuntansi terdiri dari enam unsur utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna yang berinteraksi dan memanfaatkan sistem.
2. Langkah-langkah dan instruksi yang dipakai dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta penyimpanan data.
3. Data yang merepresentasikan informasi mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
4. Perangkat lunak yang berfungsi untuk mengolah serta memproses data tersebut.
5. Sarana teknologi informasi, mencakup komputer, perangkat tambahan, serta fasilitas komunikasi jaringan yang mendukung jalannya Sistem Informasi Akuntansi.
6. Pengendalian internal dan mekanisme keamanan yang dirancang untuk menjaga dan melindungi sistem dari risiko maupun ancaman.

2.1.7.2 Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Romney et al. (2022) mengungkapkan bahwa dari keenam komponen Sistem Informasi Akuntansi diatas memungkinkan SIA dapat memenuhi tiga fungsi bisnis penting, yaitu:

1. Menghimpun serta menyimpan data terkait aktivitas, sumber daya, dan tenaga kerja organisasi. Setiap organisasi menjalankan berbagai proses bisnis, misalnya transaksi penjualan maupun pembelian bahan baku, yang biasanya dilakukan secara berulang.
2. Mengolah data menjadi informasi yang berguna sehingga pihak manajemen mampu menyusun rencana, melaksanakan kegiatan, melakukan pengawasan, serta menilai kinerja aktivitas, sumber daya, maupun personel organisasi.

3. Menyediakan sistem pengendalian yang memadai guna menjaga keamanan aset serta melindungi data milik organisasi.

2.1.7.3 Manfaat Sistem Informasi

Menurut Romney et al. (2022) Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang dirancang secara optimal mampu memberikan keuntungan serta nilai tambah bagi perusahaan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Meningkatkan mutu sekaligus menekan biaya produk maupun layanan.
2. Mendorong tercapainya efisiensi operasional.
3. Memfasilitasi pertukaran serta penyebaran pengetahuan.
4. Mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi rantai pasok (*supply chain*).
5. Memperkuat sistem serta struktur pengendalian internal.
6. Memperbesar kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan yang tepat.

2.1.7.4 Sistem Informasi & Manajemen Daerah (SIMDA)

Aplikasi SIMDA adalah perangkat lunak terpadu yang dirancang untuk mendukung kegiatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, mulai dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan dan Kelurahan (Pratama et al. 2017). Terdapat 26 aplikasi dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah yang beroperasi secara independen di setiap SKPD tetapi saling terhubung melalui database terpadu. Output yang dihasilkan membantu pimpinan daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan sekaligus menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu bagi kebutuhan administrasi pemerintahan maupun layanan masyarakat (Monica et al. 2017).

2.1.7.5 Tujuan SIMDA

Menurut BPKP. (2021) pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) memiliki beberapa tujuan utama, yaitu :

1. Mendukung Pemerintah Daerah dalam merancang serta memanfaatkan sistem informasi yang mampu mengelola keuangan dan kinerja tata kelola secara baik, termasuk pengawasan transaksi dan penyediaan informasi yang relevan.
2. SIMDA dirancang secara generik sehingga dapat dipakai oleh seluruh Pemerintah Daerah, sehingga tidak diperlukan lagi pembuatan aplikasi serupa yang memerlukan sumber daya besar.
3. Menyediakan basis data mengenai kondisi daerah yang lebih komprehensif, mencakup aspek keuangan, wilayah, kinerja pemerintahan, aparatur, serta pelayanan publik, yang kemudian dapat dijadikan dasar dalam menilai capaian kinerja instansi daerah.
4. Mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

2.1.7.6 Penerapan SIMDA

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dalam pengelolaan keuangan daerah dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, dari sisi keamanan data, SIMDA menjamin kerahasiaan serta integritas data keuangan Pemerintah Daerah. Kedua, indikator kecepatan dan ketepatan waktu menilai kemampuan sistem dalam menyajikan laporan keuangan secara cepat dan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ketiga, ketelitian menjadi tolok ukur akurasi data dan informasi yang dihasilkan oleh sistem. Keempat, dari segi variasi laporan atau output, sistem dinilai berdasarkan kemampuannya dalam menyediakan berbagai jenis laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Terakhir, indikator relevansi sistem mengukur sejauh mana SIMDA selaras dengan kebutuhan pengelolaan keuangan daerah serta regulasi yang berlaku.

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) per 30 Juni 2020, aplikasi SIMDA telah dilaksanakan pada 440 dari 542 Pemerintah Daerah di Indonesia. Implementasi ini mencakup berbagai jenis aplikasi SIMDA, antara lain: SIMDA Keuangan yang telah digunakan oleh 394 Pemerintah Daerah dengan cakupan modul penganggaran, penatausahaan, serta akuntansi dan pelaporan; SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) yang diterapkan

oleh 403 Pemerintah Daerah dengan cakupan proses mulai dari tahap perencanaan, proses pengadaan, pencatatan administrasi, penghapusan, sampai pada pencatatan akuntansi barang milik daerah; SIMDA gaji digunakan oleh 51 Pemerintah Daerah untuk membantu proses penggajian yang akurat dan cepat, serta menghasilkan dokumen gaji yang andal. Selain itu, terdapat juga SIMDA Pendapatan yang telah diterapkan pada 169 Pemerintah Daerah untuk mendukung pendataan, penetapan, dan penatausahaan pendapatan daerah.

Pengembangan sistem juga meliputi SIMDA Integrated yang digunakan oleh 196 Pemerintah Daerah, serta *Dashboard* Keuangan yang digunakan oleh 5 Pemerintah Daerah untuk menyajikan informasi *managerial* misalnya seperti Laporan Realisasi Anggaran serta rasio keuangan. Selain itu, terdapat juga koneksi CMS yang telah digunakan oleh 225 Pemerintah Daerah dalam bentuk aplikasi SP2D Online yang mempercepat proses pencairan dana dan penyetoran pajak secara real-time.

Setiap program aplikasi SIMDA dilengkapi dengan buku manual sistem dan prosedur operasional yang disesuaikan dengan jenis aplikasinya, pedoman penggunaan aplikasi, serta beragam panduan tambahan lainnya sebagai penunjang. Panduan tersebut mencakup antara lain: Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan, Modul Pengelolaan Barang Milik Daerah, Modul Substansi Pengelolaan Gaji PNS Daerah, Panduan Administrator, serta Modul Pelatihan, yang kesemuanya dirancang untuk mendukung pengelolaan keuangan di daerah yang transparan serta akuntabel (BPKP. 2021; SIMDA. 2019).

2.1.8 Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan dokumen yang menampilkan data/informasi keuangan suatu entitas pada jangka waktu tertentu. Menurut Mardiasmo.(2019), Laporan keuangan pemerintah mencakup beberapa bagian pokok, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dokumen ini bertujuan menyajikan informasi yang jelas mengenai kondisi

keuangan dan kinerja entitas pemerintahan, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat maupun Daerah, DPR/DPRD, hingga masyarakat. Selain itu, laporan ini juga menjadi wujud penerapan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pemerintah bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada publik serta memastikan dana yang dikelola telah digunakan secara efektif dan efisien (Kementerian Keuangan. 2020).

Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang BLUD. Laporan keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Kinerja. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi transparan mengenai kinerja keuangan BLUD, yang beroperasi dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya, BLUD mengelola pendapatan dan belanja secara lebih mandiri, dengan tetap mempertanggungjawabkan penggunaannya kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat. Selain itu, laporan keuangan BLUD juga menjadi alat utama dalam menilai efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan, terutama dalam sektor kesehatan (seperti Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas BLUD) serta pendidikan. Dengan penyusunan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel, BLUD dapat memastikan bahwa sumber daya yang dikelola telah dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan layanan publik (Kementerian Keuangan. 2020).

2.1.8.1 Fungsi Laporan Keuangan

Fungsi laporan keuangan sangat beragam dan mencakup berbagai aspek penting dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia IAI. (2021), Penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku dapat

memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Hal ini karena laporan yang transparan dan akurat dapat mengurangi risiko informasi asimetris antara masyarakat (Pemerintah) dan Kepala BLUD/Puskesmas guna meningkatkan nilai pelayanan Puskesmas di mata masyarakat. Lebih lanjut, laporan keuangan yang baik dapat membantu perusahaan dalam menarik investasi baru dan mempertahankan hubungan yang baik dengan kreditor (Sari et al. 2020).

Laporan keuangan dalam pemerintahan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Menurut (Mardiasmo. 2019), laporan keuangan pemerintah berfungsi untuk menyajikan gambaran secara jelas mengenai realisasi anggaran serta posisi keuangan pada suatu entitas pemerintahan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan fiskal dan anggaran. Disamping itu, laporan keuangan juga digunakan sebagai alat dalam evaluasi kinerja keuangan, di mana pemerintah dapat menilai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang telah dialokasikan (Kementerian Keuangan. 2020). Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, guna memastikan keseragaman dan keterbandingan laporan antar instansi.

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fungsi yang lebih spesifik. BLUD Merupakan unit kerja Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan lebih dalam mengatur keuangan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023) Laporan keuangan BLUD mencerminkan bagaimana pendapatan dan belanja dikelola dalam memberikan pelayanan publik, terutama dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018. (2018), Laporan keuangan BLUD mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta Laporan Kinerja. Penyusunan laporan tersebut bertujuan untuk menjaga fleksibilitas pengelolaan keuangan BLUD sambil tetap

mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, laporan keuangan ini berperan sebagai instrumen evaluasi efisiensi dan efektivitas layanan yang disediakan, sekaligus mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengelolaan sumber daya BLUD (Mardiasmo et al. 2019).

Dengan adanya laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku, baik dalam pemerintahan secara umum maupun BLUD, pemerintah dapat memastikan bahwa anggaran yang dikelola benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Laporan ini juga berperan dalam memenuhi kewajiban pelaporan kepada publik dan lembaga pengawas, seperti DPRD dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tata kelola keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel (Kementerian Keuangan. 2020).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan wujud pertanggungjawaban pihak pengelola anggaran (*agent*) atas pemanfaatan sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya kepada masyarakat atau pemerintah (*prinsipal*). Untuk mengurangi ketimpangan informasi antara prinsipal dan agen, diperlukan penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pengelolaan keuangan BLUD termasuk Puskesmas, akuntabilitas tercermin melalui pembuatan laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menurut Moresca et al. (2024), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap mutu laporan keuangan, karena mendorong para pejabat pengelola untuk menyampaikan transaksi dengan kejujuran, keterbukaan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lingkungan Puskesmas BLUD Se-Kota Metro Lampung, akuntabilitas menjadi dasar penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi layanan kesehatan pemerintah. Kualitas laporan keuangan yang baik menuntut adanya kesadaran dan komitmen dari para pelaksana anggaran untuk mempertanggungjawabkan setiap aktivitas keuangan secara sistematis. Akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya berbicara tentang tanggung jawab administratif, tetapi juga menyangkut aspek etis dan moral dalam menyampaikan laporan keuangan yang sah dan

tidak menyesatkan. (Dewi et al. 2020). menyebutkan bahwa organisasi yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi cenderung menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal dan akurat, karena proses pelaporan dilandasi dengan itikad baik dan pengawasan yang memadai. Akuntabilitas menjadi prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan sektor publik, termasuk pada institusi pelayanan kesehatan seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam konteks ini, akuntabilitas mencakup kewajiban setiap pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan segala tindakan, penggunaan sumber daya, serta hasil yang diperoleh kepada publik dan otoritas yang lebih tinggi (Mardiasmo et al. 2018). Akuntabilitas menjadi mekanisme pengendalian internal yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan melalui penerapan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sejumlah entitas Pemerintah Daerah masih belum mampu menyusun laporan keuangan dengan akuntabilitas yang memadai, hal ini disebabkan oleh lemahnya Sistem Pengendalian Internal serta kualitas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai. (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 2021). Akuntabilitas yang rendah dapat menyebabkan laporan keuangan disusun secara tidak tepat waktu, tidak sesuai standar, dan mengandung kesalahan material yang dapat mengaburkan kondisi keuangan sesungguhnya. Penelitian oleh Al-Shaer et al. (2020) menemukan bahwa kualitas pelaporan keberlanjutan (*sustainability reporting*), yang merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik, memiliki hubungan positif terhadap kualitas laporan keuangan pasca-audit. Dalam studi tersebut, organisasi yang memiliki budaya akuntabilitas tinggi dan pelaporan yang transparan terbukti cenderung menghasilkan laporan keuangan tanpa adanya kesalahan penyajian material dan lebih dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (Al-Shaer et al. 2020). Kualitas laporan keuangan yang baik meliputi empat karakteristik kualitatif utama: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Kementerian Keuangan. 2020). Akuntabilitas memengaruhi seluruh aspek tersebut. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas, maka semakin besar pula usaha institusi dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan karakteristik tersebut.

Dalam perspektif manajerial, akuntabilitas juga memengaruhi budaya organisasi. Lingkungan kerja yang mendorong transparansi dan keterbukaan cenderung menciptakan karyawan yang disiplin dalam pelaporan keuangan dan dokumentasi administratif (Nasution et al. 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang mendorong keterbukaan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum, namun juga menjadi determinan utama dalam penciptaan laporan keuangan yang berkualitas tinggi. Dalam kerangka BLUD Puskesmas, penguatan akuntabilitas secara struktural dan kultural sangat penting untuk menjamin laporan keuangan yang transparan, andal, dan tepat waktu, demi mendukung pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan profesional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tran et al.(2020) berjudul *The role of accountability in determining the relationship between accountability and performance in public organizations*, ditemukan bahwa akuntabilitas meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan kinerja organisasi publik. Penelitian ini dilakukan pada 185 instansi pemerintah di Vietnam dan menggunakan metode survei dengan analisis regresi statistik untuk menganalisis data.

Dalam penelitian lain oleh Tran et al. (2021) yang berjudul *Effects of leadership and accounting capacity on the quality of financial reporting in public organizations*, ditemukan bahwa akuntabilitas memediasi pengaruh kepemimpinan dan kapasitas akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di organisasi publik. Penelitian ini menggunakan metode survei dan model mediasi, dengan fokus pada organisasi publik di Vietnam.

Studi lain oleh Muraina et al. (2020) yang berjudul *Implementation of IPSAS on Nigeria's financial reporting quality*, menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional (IPSAS) meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah Nigeria dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan analisis deskriptif untuk menilai dampak penerapan IPSAS terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian oleh Javier et al.

(2021) yang berjudul *Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies* menyoroiti bahwa praktik transparansi secara digital dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan di lembaga pemerintah Spanyol. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif untuk menyelidiki praktik pengungkapan daring dalam lembaga-lembaga pemerintah di Spanyol.

Terakhir, penelitian gabungan antara Tran et al. (2020) dan Ahrens et al. (2020) yang berjudul *Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19* menunjukkan bahwa akuntabilitas memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan ketahanan organisasi publik, terutama di masa krisis. Penelitian ini melibatkan dua setting yang berbeda: survei pada 185 instansi pemerintah di Vietnam Tran et al. (2020) dan studi kasus deskriptif pada pemerintah lokal di Inggris setelah pandemi COVID-19.

Ringkasan ini menekankan pentingnya akuntabilitas, kepemimpinan, dan praktik akuntansi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di berbagai sektor publik di seluruh dunia. Penelitian-penelitian yang disebutkan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, baik yang dimediasi oleh kepemimpinan dan kapasitas akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas laporan keuangan. Studi di Vietnam, Nigeria, Spanyol, dan Inggris menunjukkan bahwa akuntabilitas memainkan peran kunci dalam memperkuat kinerja organisasi publik dan ketahanan finansial mereka, terutama di masa krisis. Praktik transparansi, baik secara digital maupun melalui kebijakan akuntansi yang baik, terbukti memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan di berbagai Negara.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas Se-Kota Metro

2.2.2 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor kunci yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan

teknis, serta pemahaman terhadap regulasi keuangan BLUD yang berlaku. Seseorang yang memiliki kompetensi yang baik akan berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk menjaga nama baik organisasi. Dewi. (2020) mengemukakan bahwa semakin tinggi kompetensi pegawai dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, maka semakin tinggi pula kualitas informasi keuangan yang dihasilkan. Di Puskesmas Se-Kota Metro Lampung, keberadaan SDM yang terlatih dan profesional sangat diperlukan untuk menjamin ketepatan, keandalan, dan transparansi laporan keuangan BLUD. Selain kompetensi teknis, sikap dan etika kerja juga menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. SDM yang memiliki integritas dan akuntabilitas akan lebih hati-hati dan objektif dalam menyusun laporan, serta mematuhi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual yang diterapkan pada BLUD. Menurut Moresca et al. (2024), kombinasi antara kompetensi teknis dan integritas personal akan menciptakan sistem pelaporan yang tidak hanya akurat secara angka, tetapi juga kuat dari sisi kepercayaan publik. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi SDM harus menjadi prioritas dalam sistem tata kelola keuangan Puskesmas BLUD.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor krusial yang memengaruhi kualitas laporan keuangan, khususnya di lingkungan sektor publik seperti Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kompetensi merujuk pada kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien (Boyatzis. 1982; Spencer, L. M. & Spencer. 1993) Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan, sistem pelaporan keuangan, serta regulasi yang berlaku (IFAC. 2022).

Menurut Armstrong et al. (2014), pengembangan kompetensi yang tepat memungkinkan pegawai untuk menghasilkan output yang lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Dalam konteks laporan keuangan, kompetensi yang tinggi akan menghasilkan laporan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

Kementerian Keuangan. (2020), tepat waktu, lengkap, dan bebas dari kesalahan material, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi publik (Mardiasmo et al. 2019).

Penelitian oleh Anggraini et al. (2024) menunjukkan bahwa kompetensi teknis yang dimiliki oleh pegawai akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaporan keuangan. Karyawan yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses akuntansi, teknologi informasi, dan pengendalian internal mampu menyusun laporan keuangan dengan lebih tepat dan akurat. Hal ini juga didukung oleh temuan dari Susena et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi SDM, bersama dengan pengendalian internal, berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, terlebih ketika didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Kompetensi juga memengaruhi kemampuan pegawai dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan kebijakan keuangan serta dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem pelaporan keuangan. McClelland et al. (1973) menyatakan bahwa pengukuran keberhasilan kerja lebih relevan dilakukan dengan menilai kompetensi dibandingkan hanya mengandalkan tingkat intelegensi. Kompetensi yang baik membantu individu mengambil keputusan yang benar dalam pelaporan keuangan dan menghindari kesalahan yang dapat menimbulkan bias atau ketidakakuratan dalam laporan keuangan.

Al-Shaer et al. (2020) menyoroti bahwa kualitas pelaporan keuangan pasca audit dipengaruhi oleh kemampuan individu dalam menyusun laporan keuangan yang andal sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Auditor. Artinya, tingkat kompetensi individu dalam menyusun laporan keuangan menjadi fondasi utama terhadap kualitas akhir dari laporan tersebut. Hal ini juga menjadi dasar penting dalam BLUD, mengingat laporan keuangan merupakan salah satu tolak ukur efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana publik (BPKP. 2021).

Dalam konteks BLUD Kesehatan di Puskesmas Kota Metro, kompetensi SDM menjadi sangat penting karena mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengelola dana operasional secara profesional dan akuntabel. Penguasaan terhadap sistem informasi manajemen keuangan, standar pelaporan, serta kebijakan kesehatan daerah menjadi kunci untuk menghasilkan laporan keuangan

yang berkualitas. Jika kompetensi pegawai rendah, maka akan timbul risiko kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan, serta ketidakakuratan dalam penyajian informasi keuangan (Maria et al. 2020). Dengan demikian, Semakin kompeten Sumber Daya Manusia yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan, maka kualitas laporan tersebut akan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi SDM memberikan dampak yang signifikan dan positif terhadap mutu laporan keuangan pada BLUD, sebagaimana telah didukung oleh berbagai penelitian dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian oleh Tran et al. (2021) menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang baik dalam organisasi publik dapat meningkatkan akuntabilitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM di bidang akuntansi, seperti pemahaman terhadap prinsip-prinsip akuntansi, penggunaan sistem pelaporan keuangan yang tepat, dan kemampuan dalam pengelolaan data keuangan, memungkinkan organisasi untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam penelitian ini, akuntabilitas berfungsi sebagai mediator yang menghubungkan kompetensi SDM dengan kualitas laporan keuangan, dengan menggunakan *Institutional Theory* untuk menjelaskan bahwa penerapan standar dan prosedur yang akuntabel dalam pelaporan keuangan membutuhkan kompetensi yang memadai pada SDM.

Penelitian Jatmiko et al. (2020) di Indonesia menyoroti bahwa selain kompetensi SDM, sistem pengendalian intern yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM yang tinggi, terutama di unit akuntansi, berkontribusi pada pengelolaan sistem pengendalian yang efektif, yang memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan dicatat dengan benar dan transparan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM di sektor publik akan meningkatkan kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang lebih baik, serta mengurangi potensi kesalahan atau penyimpangan dalam pelaporan. Sistem Pengendalian Intern yang memadai, yang dijalankan oleh SDM yang kompeten, memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

Penelitian oleh John et al. (2023) menunjukkan bahwa kemampuan SDM dalam *Information Technology* (IT) juga berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan. Kemampuan SDM untuk menggunakan teknologi informasi yang relevan dalam proses pengolahan dan pelaporan keuangan memungkinkan organisasi untuk menghasilkan laporan yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih atau sistem informasi akuntansi berbasis teknologi memungkinkan SDM untuk memproses data keuangan dengan lebih efisien, mengurangi risiko kesalahan manusia, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan. Dalam hal ini, kompetensi SDM dalam hal kemampuan IT sangat penting untuk mendukung kualitas pelaporan keuangan yang lebih baik.

Ann et al. (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM, ditambah dengan kapabilitas manajerial, juga berpengaruh pada kualitas laporan keuangan. Kompetensi SDM tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam akuntansi, tetapi juga kemampuan manajerial dalam mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan keuangan. Kapabilitas manajerial yang baik, bersama dengan kompetensi SDM yang mumpuni, dapat meningkatkan pengelolaan laporan keuangan dan memastikan bahwa laporan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan serta mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. *Dynamic Capability Theory* digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana kemampuan manajerial yang dinamis, didukung oleh kompetensi SDM, dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian oleh Avishek et al. (2021) menunjukkan bahwa selain kompetensi teknis dalam akuntansi, budaya organisasi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Budaya yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan etika dalam organisasi akan mendorong SDM untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Ketika kompetensi SDM dipadukan dengan budaya organisasi yang kuat dalam hal transparansi dan akuntabilitas, laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan *Cultural Theory* untuk menjelaskan

bagaimana nilai-nilai budaya dalam organisasi mempengaruhi perilaku SDM dalam menyusun laporan keuangan.

Secara keseluruhan, kompetensi SDM di sektor publik dan swasta berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Kompetensi yang mencakup keterampilan teknis, kapabilitas manajerial, pemahaman teknologi informasi, serta budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas dan transparansi, semuanya berkontribusi pada pengelolaan laporan keuangan yang lebih baik. Peningkatan kompetensi SDM, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis, akan memperkuat sistem pelaporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperbaiki kualitas laporan keuangan di organisasi.

H2 : Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Kesehatan Kota Metro

2.2.3 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berperan penting dalam membantu proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan pelaporan transaksi keuangan di Puskesmas BLUD. Keberadaan SIA yang efektif akan menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh manajemen auditor dan publik sehingga akan mengurangi asimetri informasi antara *principal* (masyarakat) dan *agent* (Kepala Puskesmas) hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Venkatesh et al. (2003) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi informasi sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap kemudahan dan kegunaannya. Dalam konteks Puskesmas BLUD Se-Kota Metro Lampung, keberhasilan implementasi SIA akan meningkatkan efisiensi operasional dan mempercepat proses pelaporan keuangan rutin yang sesuai dengan standar pemerintah.

Penelitian Dewi et al. (2003) menyatakan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang baik akan meminimalisasi kesalahan manual dalam proses pencatatan dan pelaporan, serta mempermudah proses verifikasi dan pengawasan internal. Dalam

sektor pelayanan publik seperti Puskesmas BLUD, keberadaan SIA yang terintegrasi menjadi sangat krusial untuk mendukung transparansi anggaran dan pertanggungjawaban keuangan kepada publik. Moresca et al. (2024) juga menyebutkan bahwa SIA yang berjalan optimal akan memperkuat fungsi audit internal dan membantu mendeteksi ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengelola informasi keuangan dalam organisasi. Dalam konteks sektor kesehatan, SIA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan biaya dan memastikan akurasi dalam pelaporan keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, SIA kini juga berperan dalam menyajikan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Chugh et al. 2024; Kihuba et al. 2016).

Karakteristik utama dari SIA di sektor kesehatan adalah integrasi data, kecepatan pemrosesan informasi, serta kemampuan untuk menghasilkan laporan yang relevan dan tepat waktu. Dalam konteks BLUD, sistem ini juga memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan bertanggung jawab (Teoh et al. 2024). Dalam organisasi publik, termasuk BLUD, implementasi Sistem Informasi Akuntansi yang efektif dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hal ini karena sistem tersebut memungkinkan pencatatan dan pelaporan yang lebih tepat waktu, akurat, dan transparan. Sebuah penelitian oleh Kihuba et al. (2016) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Akuntansi di sektor kesehatan, khususnya di Kenya, meningkatkan kualitas pelaporan biaya dan memastikan pelaporan yang lebih akurat serta memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Penelitian oleh Chugh et al. (2024) di India juga menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi biaya dalam rumah sakit meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sistem informasi yang baik memungkinkan pengelolaan biaya yang lebih efisien dan penyajian laporan yang lebih dapat dipercaya. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi yang efisien dalam sektor kesehatan membantu meningkatkan akurasi dalam pelaporan keuangan, serta mempermudah pengelolaan anggaran dan biaya operasional. Dengan data

yang terintegrasi, BLUD dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan tepat waktu, yang penting untuk pengambilan keputusan (Teoh et al. 2024).

Meskipun ada banyak manfaat, penerapan SIA di sektor kesehatan juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan anggaran, pelatihan staf yang diperlukan, serta resistensi terhadap perubahan teknologi. Penelitian oleh Musiega et al. (2024) menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansi adalah adaptasi terhadap sistem baru dan masalah dalam Sumber Daya Manusia yang terlatih. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam konteks lembaga kesehatan, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa implementasi SIA yang baik dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi laporan keuangan yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Kihuba et al. (2016) dalam penelitian mereka tentang tantangan dan peluang dalam implementasi sistem akuntansi biaya di sektor kesehatan Kenya mengungkapkan bahwa penerapan SIA di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya membantu dalam meningkatkan transparansi dan akurasi laporan keuangan. Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntansi biaya dalam pengelolaan Rumah Sakit agar lebih efisien dan akurat dalam laporan keuangan. Implementasi sistem ini memungkinkan Rumah Sakit untuk memperoleh data yang lebih tepat tentang biaya operasional dan sumber daya, yang penting dalam pengelolaan keuangan kesehatan. Oleh karena itu, SIA berperan penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan di sektor kesehatan.

Chugh et al. (2024) di India melakukan penelitian serupa di sektor Rumah Sakit dengan tujuan mengeksplorasi pengaruh akuntansi biaya terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian SIA dalam Rumah Sakit di India memperbaiki pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem yang lebih terstruktur dalam mengelola biaya, Rumah Sakit dapat menghasilkan laporan

keuangan yang lebih akurat, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan sistem akuntansi yang baik sangat penting untuk mencapai kualitas pelaporan yang lebih baik.

Teoh et al. (2024) menyoroti pentingnya pembaruan model akuntansi dalam sektor kesehatan. Penelitian ini mengkritik sistem akuntansi yang ketinggalan zaman dan menyarankan agar Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan memperbarui sistem informasi akuntansi mereka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sistem akuntansi yang modern dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh banyak Rumah Sakit terkait pengelolaan keuangan dan pelaporan. Pembaruan sistem ini memungkinkan organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akurat, yang sangat penting dalam meningkatkan pengambilan keputusan di sektor kesehatan.

Dari tiga penelitian yang telah dibahas di atas, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi (SIA) memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, terutama dalam sektor kesehatan dan BLUD. Penerapan SIA yang efektif mampu meningkatkan transparansi, akurasi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan yang sangat penting untuk pengelolaan anggaran di Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan. Selain itu, penelitian juga menunjukkan bahwa pembaruan terhadap model akuntansi yang digunakan, serta penerapan akuntansi biaya, merupakan langkah penting untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelolaan Sistem Informasi Akuntansi yang baik dapat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BLUD di sektor kesehatan.

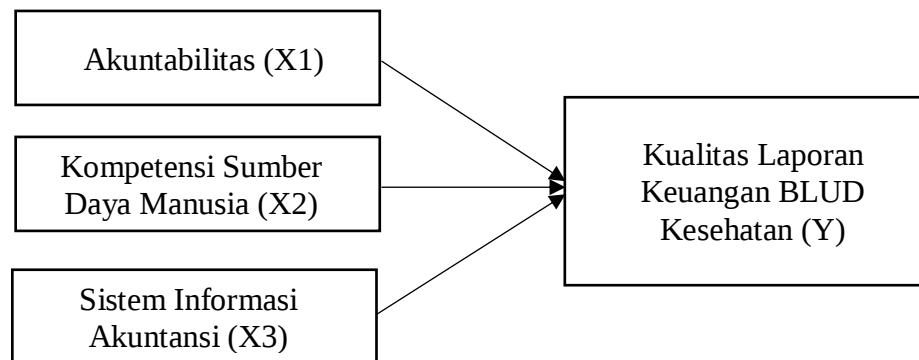
H3: Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Se-Kota Metro

2.3 Kerangka Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan landasan teori yang dibangun, Indikator akuntabilitas, kompetensi SDM & Sistem Informasi Akuntansi serta kualitas laporan keuangan yang disusun berdasarkan Ardhani-Moresca (2023), Dewi (2022), dan Nkates (2021), yang menekankan integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam pelaporan sektor publik.

Kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pengelola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan yang bertugas di seluruh Puskesmas Kota Metro, Provinsi Lampung. Populasi ini mencakup aparatur yang terlibat langsung dalam proses penyusunan dan pelaporan keuangan, baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun tenaga kontrak. Populasi 11 puskesmas $\times$ 5 orang = maksimal 55 responden.

3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah tenaga pengelola keuangan yang memiliki peran dalam penyusunan laporan keuangan di masing-masing Puskesmas Kota Metro. Jumlah responden dalam penelitian maksimal 55 orang, dengan minimal 30 responden yang memenuhi kriteria. Dimana 5 orang tersebut adalah:

1. Penyusun Laporan Keuangan/Pembantu Bendahara Pengeluaran Puskesmas
2. Bendahara BLUD Puskesmas
3. Bendahara BOK Puskesmas
4. Bendahara APBD Puskesmas
5. Bendahara Barang /Pengurus & Pengelola Barang Puskesmas

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kriteria responden adalah:

1. Bertugas langsung dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan BLUD;
2. Telah bekerja minimal satu (1) tahun sampai dengan tahun 2024.

Hal ini disebabkan para responden memiliki latar belakang Pendidikan di bidang Kesehatan sehingga tugas utamanya sebagai tenaga medis yang memberikan

pelayanan dan Bendahara merupakan tugas tambahan saja, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian jabatan tersebut.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif.

1. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sesuai dengan kriteria.
2. Data sekunder diperoleh dari dokumen laporan keuangan, struktur organisasi, serta data pendukung lain yang relevan di lingkungan Puskesmas Kota Metro.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah:

1. Kuesioner

Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup berbasis skala Likert 1-5, yang terdiri dari lima kategori jawaban yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), 5 = Sangat Setuju (SS).

Kuesioner disusun berdasarkan adaptasi dan pengembangan dari instrumen yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikut rincian kuesioner yang digunakan dalam penelitian:

a. Variabel Akuntabilitas (X1)

Instrumen ini merujuk pada penelitian Khoirunnisa, A., & Wijaya. (2023), terdiri dari 7 item pernyataan. Hasil uji validitas sebelumnya menunjukkan semua item valid dengan nilai korelasi $> 0,30$ dan reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,845, yang mengindikasikan konsistensi instrumen yang sangat baik.

b. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

Instrumen ini diadaptasi dari penelitian Anggraini. (2020), yang terdiri dari 6 item pernyataan. Instrumen ini telah melalui uji validitas dengan hasil nilai korelasi

item-total di atas 0,30, serta reliabilitas Cronbach Alpha sebesar 0,812, yang menunjukkan tingkat reliabilitas yang baik.

c. Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X3)

Variabel Sistem Informasi Akuntansi (SIA) diukur dengan menggunakan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003). Model ini terdiri dari lima konstruk utama yang mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan pemanfaatan teknologi oleh pengguna, yaitu: *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Facilitating Conditions*, dan *Behavioral Intention*. Total terdapat 19 item pernyataan, dengan distribusi: *Performance Expectancy* (4 item), *Effort Expectancy* (4 item), *Social Influence* (4 item), *Facilitating Conditions* (4 item, termasuk 1 item dengan skor terbalik), dan *Behavioral Intention* (3 item). Indikator dalam setiap konstruk disesuaikan secara kontekstual agar relevan dengan pengukuran persepsi staf Puskesmas terhadap penggunaan SIA. Misalnya:

Performance Expectancy diukur melalui persepsi responden terhadap efektivitas kerja, seperti “Penggunaan sistem informasi akuntansi membantu saya menyelesaikan pekerjaan lebih cepat,” atau “SIA meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Puskesmas.”

Effort Expectancy mencerminkan persepsi kemudahan, contohnya: “SIA mudah digunakan tanpa pelatihan intensif,” atau “Langkah-langkah dalam penggunaan sistem tidak rumit.”

Social Influence menggambarkan tekanan sosial atau dukungan lingkungan, seperti “Atasan saya mendorong penggunaan SIA dalam penyusunan laporan keuangan.”

Facilitating Conditions mencakup dukungan infrastruktur dan pelatihan, misalnya: “Saya memiliki akses ke bantuan teknis saat menghadapi kendala dalam penggunaan SIA.” Salah satu item pada dimensi ini akan dibalik skor penilaiannya untuk menjaga kejujuran respon.

Behavioral Intention mencerminkan komitmen dan niat penggunaan ke depan, seperti: “Saya akan terus menggunakan SIA untuk mendukung pekerjaan saya di masa mendatang.”

Instrumen UTAUT telah terbukti memiliki validitas konstruk yang tinggi ($AVE > 0,50$) dan reliabilitas komposit yang kuat ($CR > 0,80$) dalam berbagai penelitian sebelumnya, termasuk dalam konteks organisasi sektor publik dan layanan kesehatan.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Instrumen ini merujuk pada penelitian Mariska. (2024), terdiri dari 6 item pernyataan yang mengukur dimensi relevansi, keandalan, perbandingan, dan kejelasan laporan keuangan. Hasil uji validitas sebelumnya menunjukkan seluruh item valid (nilai r hitung $> 0,30$) dan reliabilitas *Cronbach Alpha* sebesar 0,832, menunjukkan konsistensi instrumen yang baik.

2. Dokumentasi

Digunakan untuk memperoleh data pendukung seperti dokumen laporan keuangan dan struktur organisasi BLUD.

3.4 Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Akuntabilitas (X1)

Akuntabilitas dalam konteks ini mengacu pada tingkat pertanggungjawaban organisasi publik, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana lembaga publik bertindak transparan, bertanggung jawab dan memiliki sistem pelaporan yang efektif.

Variabel ini diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu:

1. Pertanggungjawaban organisasi publik
2. Efektivitas pelaporan
3. Transparansi penggunaan dana publik

Masing-masing dimensi dijabarkan dalam indikator seperti sistem pengelolaan organisasi, penyusunan program dan anggaran, hingga penggunaan dana publik secara terbuka. Definisi dan indikator ini mengacu pada penelitian oleh Wijaya. (2024) yang pertama kali mengembangkan instrumen pengukuran ini dalam konteks laporan keuangan sektor publik.

3.4.2 Variabel Kompetensi SDM (X2)

Kompetensi SDM didefinisikan sebagai kemampuan teknis dan profesional yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan tugas akuntansi, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam pelaksanaan fungsi pelaporan keuangan. Kompetensi SDM menjadi faktor penting dalam menjamin akurasi dan kepatuhan terhadap regulasi akuntansi.

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Knowledge* (pengetahuan)
2. *Skill* (keterampilan)
3. *Attitude* (sikap profesional)

Indikatornya antara lain: pemahaman regulasi, partisipasi dalam pelatihan, kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai standar, serta etika dan integritas kerja. Rancangan dimensi dan indikator ini mengacu pada instrumen yang pertama kali digunakan oleh Anggraini. (2020) dalam kajian kompetensi teknis dan efektivitas pelaporan keuangan di sektor publik.

3.4.3 Sistem Informasi Akuntansi (X3)

Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X3) diukur berdasarkan model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang dikembangkan oleh Venkatesh et al. (2003), dengan penyesuaian pada konteks penggunaan sistem informasi di lingkungan BLUD Puskesmas. Model ini mengukur sejauh mana individu menerima dan menggunakan teknologi melalui lima konstruk utama, yaitu: *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, *Facilitating Conditions*, dan *Behavioral Intention*. Masing-masing konstruk terdiri dari

sejumlah indikator yang direpresentasikan dalam bentuk pernyataan yang relevan dengan fungsi dan penerapan sistem informasi akuntansi.

Dimensi *Performance Expectancy* diukur melalui persepsi responden terhadap manfaat SIA dalam mendukung efektivitas kerja, seperti percepatan penyelesaian laporan keuangan dan peningkatan produktivitas individu. *Effort Expectancy* mencerminkan sejauh mana sistem dianggap mudah digunakan, termasuk kemudahan belajar dan mengoperasikan SIA tanpa pelatihan yang kompleks. *Social Influence* berkaitan dengan dukungan dan pengaruh sosial dari atasan, rekan kerja, serta budaya organisasi dalam mendorong penggunaan sistem. *Facilitating Conditions* menilai ketersediaan fasilitas, dukungan teknis, serta kompatibilitas sistem yang digunakan, termasuk satu item yang bersifat negatif (dibalik skornya) untuk menjaga validitas respon. Terakhir, *Behavioral Intention* mengukur niat dan komitmen pengguna dalam menggunakan SIA secara berkelanjutan dalam tugas-tugas keuangan mereka.

Instrumen ini terdiri dari 19 item pernyataan yang disusun dalam skala Likert 5 poin (1 = Sangat Tidak Setuju hingga 5 = Sangat Setuju), dengan distribusi: *Performance Expectancy* (4 item), *Effort Expectancy* (4 item), *Social Influence* (4 item), *Facilitating Conditions* (4 item, termasuk 1 item dibalik), dan *Behavioral Intention* (3 item). Instrumen UTAUT telah terbukti memiliki validitas konstruk yang baik ($AVE > 0,50$) dan reliabilitas yang tinggi ($CR > 0,80$) dalam berbagai penelitian di sektor publik dan layanan kesehatan.

3.4.4 Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan merujuk pada tingkat transparansi, keandalan, relevansi, keterbandingan, lengkap dan kemudahan akses informasi dalam laporan keuangan yang disusun oleh lembaga publik. Laporan keuangan yang berkualitas diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Variabel ini diukur melalui tiga dimensi utama:

1. Relevansi informasi
2. Keandalan dan keterbandingan
3. Penyajian dan aksesibilitas informasi

Indikator yang digunakan antara lain kejelasan penyajian informasi, format dan istilah yang dapat dipahami, serta kemudahan membandingkan antar periode atau antar wilayah. Dimensi dan indikator tersebut diadopsi dari penelitian oleh Mariska. (2024) yang pertama kali mengembangkan instrumen ini dalam konteks pelaporan keuangan publik.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi	No Konstruk	Indikator	Kode Pertanyaan	Sumber Penelitian Sebelumnya
Akuntabilitas (X1)	Pertanggungjawaban organisasi publik	X1_1	Pengelolaan organisasi	A.1	Moresca Ardani Putu Wijaya (2024);
		X1_2	Sistem informasi & prosedur	A.2	
		X1_3	Kesesuaian visi-misi	A.3	
	Efektivitas pelaporan	X1_4	Penyusunan program	A.4	
		X1_5	Perencanaan anggaran	A.5	
	Transparansi penggunaan dana	X1_6	Dampak kebijakan	A.6	
		X1_7	Penggunaan dana publik	A.7	
Kompetensi SDM (X2)	Knowledge	X2_1	Pemahaman regulasi akuntansi	KSDM.1	I Gusti Ayu Krisna Dewi (2020);
		X2_2	Membaca literatur/jurnal	KSDM.2	
		X2_3	Penyusunan laporan sesuai regulasi	KSDM.3	
	Skill	X2_4	Mengikuti pelatihan	KSDM.4	
	Attitude	X2_5	Etika profesi	KSDM.5	
		X2_6	Penolakan intervensi	KSDM.6	
Sistem Informasi Akuntansi (X3)	Performance Expectancy	X3_1	Harapan kinerja	SIA.1 – SIA.4	Venkatesh et al. (2003)
	Effort Expectancy	X3_2	Harapan usaha	SIA.5 – SIA.8	
	Social Influence	X3_3	Pengaruh sosial	SIA.9 – SIA.12	

Variabel	Dimensi	No Kons truk	Indikator	Kode Pertanyaan	Sumber Penelitian Sebelumnya
Kualitas Laporan Keuanga n (Y)	Facilitating Conditions	X3_4	Dukungan teknis	SIA.13 – SIA.16	Ardani Moresca Putu Wijaya (2024)
	Behavioral Intention	X3_5	Niat penggunaan	SIA.17 – SIA.19	
	Relevansi	Y_1	Relevansi informasi	KLK.1	
	Keandalan & keterbandingan	Y_2	Keandalan & kejujuran	KLK.2	
		Y_3	Keterbandingan antar periode	KLK.3	
		Y_4	Keterbandingan antar wilayah	KLK.4	
		Y_5	Kejelasan penyajian	KLK.5	
	Penyajian & aksesibilitas informasi	Y_6	Istilah & format sesuai pemahaman	KLK.6	

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Pilot Study

Sebelum penelitian dilakukan maka dipandang perlu menyebarkan kuesioner kepada beberapa responden untuk mengetahui apakah kuesioner itu baik dan layak atau tidak. Uji coba ini disebut uji pilot atau pilot study (Sugiyono, 2012). Langkah-langkah pilot study dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan Objek yang Diukur

Sebelum menyusun suatu kuesioner terlebih dahulu ditentukan objek yang hendak diukur. Objek dalam penelitian ini adalah pengaruh akuntabilitas, kompetensi SDM, dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Kuesioner yang digunakan pada penelitian ini menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) pilihan jawaban, yaitu Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS) untuk tiap butir pertanyaan. Kuesioner ydisebarkan kepada masyarakat wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sleman.

2. Menentukan Aspek-aspek yang akan Diukur

Aspek-aspek yang hendak diukur adalah tentang akuntabilitas, kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas laporan keuangan.

3. Membuat Kuesioner Penelitian

Kuesioner disusun berdasarkan penelitian sebelumnya Moresca. (2024); Dewi et al. (2020); Venkatesh et. al, (2023) yang dimodifikasi oleh peneliti.

Tabel 3.2 Kuesioner Penelitian

Akuntabilitas (X1)

No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Kantor di tempat Bapak/Ibu mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan organisasinya secara efektif dan efisien.					
2	Kantor di tempat Bapak/Ibu mampu menjamin adanya sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi yang memadai.					
3	Kantor di tempat Bapak/Ibu mampu mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan program yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan.					
4	Kantor di tempat Bapak/Ibu memiliki penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.					
5	Kantor di tempat Bapak/Ibu selalu melakukan perencanaan anggaran.					
6	Kantor di tempat Bapak/Ibu mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.					

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2)

No	Pertanyaan	1	2	3	4	5
1	Saya memahami PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Siklus akuntansi dengan baik					
2	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng-upgrade pengetahuan saya dibidang akuntansi					
3	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah					
4	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan					
5	Saya bekerja berdasarkan praktik yang telah ditetapkan dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan					

6	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat mempengaruhi pelanggaran terhadap aturan					
7	Saya merasa tidak perlu meningkatkan kemampuan saya dalam menyusun laporan keuangan					
Sistem Informasi Akuntansi (X3)						
No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
Performance Expectancy (Harapan Kinerja)						
1	Jika saya menggunakan sistem ini, saya akan meningkatkan peluang saya untuk mendapatkan kenaikan gaji.					
Effort Expectancy (Harapan Usaha)						
2	Interaksi saya dengan sistem ini jelas dan mudah dipahami.					
3	Akan mudah bagi saya untuk menjadi mahir dalam menggunakan sistem ini.					
4	Saya merasa sistem ini mudah digunakan.					
5	Belajar mengoperasikan sistem ini mudah bagi saya.					
Social Influence (Pengaruh Sosial)						
6	Orang-orang yang memengaruhi perilaku saya berpikir bahwa saya harus menggunakan sistem ini.					
7	Orang-orang yang penting bagi saya berpikir bahwa saya harus menggunakan sistem ini.					
8	Manajemen senior telah membantu dalam penggunaan sistem ini.					
9	Secara umum, organisasi mendukung penggunaan sistem ini.					
Facilitating Conditions (Kondisi Pendukung)						
10	Saya memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menggunakan sistem ini.					
11	Saya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menggunakan sistem ini.					
12	Ada orang atau kelompok tertentu yang tersedia untuk membantu jika saya mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem ini.					
Behavioral Intention (Niat Perilaku)						
13	Saya berniat menggunakan sistem ini dalam <n> bulan ke depan.					
14	Saya memprediksi bahwa saya akan menggunakan sistem ini dalam <n> bulan ke depan.					
15	Saya berencana menggunakan sistem ini dalam <n> bulan ke depan.					
Kualitas Laporan Keuangan (Y)						
No.	Pernyataan	1	2	3	4	5
1	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu.					

2	Laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan kenyataan (penyajian jujur).
3	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan pada periode sebelumnya.
4	Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan laporan wilayah lain yang sejenis.
5	Laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi secara jelas.
6	Laporan keuangan yang dihasilkan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
7	Laporan keuangan yang disusun biasanya tidak menggambarkan kondisi keuangan yang sebenarnya

3.5.2 Pengujian Keabsahan Kuesioner

Teknik yang digunakan dalam pengujian keabsahan kuisisioner adalah sebagai berikut:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah alat untuk menguji apakah tiap-tiap butir pertanyaan benar-benar telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki (Arikunto. 2013). Semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. Pengujian validitas memakai teknik korelasi product moment. Suatu instrumen dinyatakan valid jika memiliki nilai r -hitung $>$ r -tabel. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13 (Ghozali. 2014).

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator pada masing-masing variabel, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Akuntabilitas (X2), Sistem Informasi Akuntansi (X3), dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Kuesioner ini disusun dengan mengadaptasi indikator dari penelitian-penelitian sebelumnya serta teori-teori yang relevan. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas instrumen, dilakukan uji coba (*pilot test*) kepada 17 responden dengan tingkat signifikansi 5% (r tabel = 0,482).

Kuesioner Awal

Pada tahap awal, masing-masing variabel disusun dengan jumlah item sebagai berikut:

Kompetensi SDM (X1): 7 item

Akuntabilitas (X2): 8 item

Sistem Informasi Akuntansi (X3): 19 item

Kualitas Laporan Keuangan (Y): 7 item

Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai *Corrected Item-Total Correlation* dari masing-masing item terhadap r tabel (0,482). Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa item dinyatakan tidak valid karena memiliki korelasi di bawah r tabel, yaitu:

Variabel Akuntabilitas: p5 dan p8 tidak valid.

Variabel Sistem Informasi Akuntansi: p1, p2, p3, dan p15 tidak valid. Sementara seluruh item pada variabel Kompetensi SDM dan Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan valid.

Revisi Instrumen

Berdasarkan hasil analisis validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan revisi terhadap kuesioner awal. Item-item yang tidak valid dihapus dari instrumen, dengan pertimbangan bahwa keberadaan item tersebut dapat mengganggu konsistensi dan ketepatan hasil penelitian. Dengan demikian, jumlah item yang digunakan dalam penelitian ini setelah revisi menjadi:

Kompetensi SDM (X1): tetap 7 item (semua valid)

Akuntabilitas (X2): 6 item (p5 dan p8 dihapus)

Sistem Informasi Akuntansi (X3): 15 item (item p1, p2, p3, dan p15 dihapus)

Kualitas Laporan Keuangan (Y): tetap 7 item (semua valid)

Hasil uji validitasnya dijelaskan seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r_{hitung}	Status
X1 – Akuntabilitas	P1	0.77	Valid
	P2	0.775	Valid
	P3	0.794	Valid
	P4	0.714	Valid
	P6	0.745	Valid
	P7	0.762	Valid
	P7	0.762	Valid
X2– Kompetensi SDM	P1	0.785	Valid
	P2	0.719	Valid
	P3	0.735	Valid
	P4	0.791	Valid
	P5	0.745	Valid
	P6	0.756	Valid
	P7	0.739	Valid
X3 – Sistem Informasi Akuntansi	P4	0.764	Valid
	P5	0.765	Valid
	P6	0.76	Valid
	P7	0.728	Valid
	P8	0.725	Valid
	P9	0.762	Valid
	P10	0.766	Valid
	P11	0.772	Valid
	P12	0.754	Valid
	P13	0.778	Valid
	P14	0.76	Valid
	P16	0.739	Valid
	P17	0.758	Valid
	P18	0.745	Valid
	P19	0.743	Valid
Y – Kualitas Laporan Keuangan	P1	0.728	Valid
	P2	0.73	Valid
	P3	0.778	Valid
	P4	0.778	Valid
	P5	0.793	Valid
	P6	0.786	Valid
	P7	0.74	Valid

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji validitas telah memenuhi syarat yang ditentukan. Artinya instrumen kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan cukup valid.

2. Uji Reliabilitas

Tujuan dari pengujian reliabilitas ini adalah untuk menguji apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden benar-benar dapat diandalkan sebagai alat pengukur

(Arikunto, 2013). Untuk mengetahui tingkat reliabilitas kuesioner digunakan rumus *Alpha Cronbach's*.

Suatu instrumen dinyatakan reliabel jika memiliki nilai *Coefficient Alpha Cronbach* > 0.60 . Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 23 (Ghozali. 2014).

Berdasarkan perhitungan *Cronbach's Alpha* dengan bantuan program SPSS v16 (2007) diketahui hasil pengujian reliabilitas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* (α) masing-masing sebesar 0,860 (Akuntabilitas), 0,860 (Kompetensi SDM), 0,917 (Sistem Informasi Akuntansi), dan 0,917 (Kualitas Laporan Keuangan) yang kesemuanya $> 0,60$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan telah memenuhi syarat reliabilitas atau dengan kata lain bahwa tingkat realibilitas angket ini cukup reliabel sebagai instrumen penelitian.

3.5.3 Analisis Statistik Deskriptif

Digunakan untuk menggambarkan profil responden dan distribusi jawaban responden terhadap variabel penelitian. Analisis persentase dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 13.

3.5.4 Analisis Statistik Inferensial

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan metode *Structural Equation Modeling* yaitu Partial Least Squares (SEM-PLS). SEM-PLS merupakan pendekatan analisis multivariat yang mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan dalam satu model yang kompleks. Pendekatan ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam menganalisis data yang berdistribusi non-normal, ukuran sampel yang relatif kecil, serta model yang melibatkan variabel-variabel laten (yang diukur melalui beberapa indikator).

3.5.5 Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif digunakan untuk memperkuat dan memperkaya temuan dari hasil data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui catatan dokumentasi, wawancara terbatas melalui video call whats app yang diperkuat kembali melalui

wawancara tertulis, atau observasi terhadap praktik pelaporan keuangan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan di Puskesmas Kota Metro.

Proses analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data

Menyortir, memilih, dan merangkum data yang relevan dengan fokus pada aspek akuntabilitas, kompetensi SDM, Sistem Informasi Akuntansi dan kualitas laporan keuangan.

2. Penyajian Data

Data disusun dalam bentuk narasi deskriptif atau matriks tematik untuk menggambarkan pola-pola atau permasalahan yang muncul di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Menafsirkan makna dari temuan data dan mengaitkannya dengan hasil analisis kuantitatif, serta memverifikasi temuan melalui triangulasi dengan data dokumentasi dan persepsi responden.

Analisis kualitatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai konteks, kendala, dan praktik nyata terkait akuntabilitas, kompetensi SDM dan Sistem Informasi Akuntansi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD di lingkungan Puskesmas Se-Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis statistik, interpretasi hasil kualitatif, serta pembahasan teori dan studi literatur dari jurnal-jurnal ilmiah, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan BLUD Puskesmas Se-Kota Metro ($\beta = 0.265$; $p = 0.220$). Hasil wawancara mengungkap bahwa sebagian besar staf masih menjalankan akuntabilitas secara administratif dan belum berlandaskan kesadaran moral.

Hal ini mengindikasikan bahwa nilai akuntabilitas belum membudaya secara merata, yang menyebabkan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan menjadi tidak signifikan.

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($\beta = 0.542$; $p = 0.0001$).

Meskipun demikian, kendala seperti tenaga pelapor yang tidak memiliki latar belakang akuntansi masih ditemui di beberapa unit. Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi secara menyeluruh melalui pelatihan formal, pendampingan teknis, dan rekrutmen tenaga profesional.

3. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan ($\beta = 0.040$; $p = 0.861$), hal ini disebabkan terdapat hambatan lain seperti tidak tersedianya fitur cetak otomatis juga memengaruhi efisiensi yang menandakan bahwa efektivitas SIA tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem, tetapi juga pada dukungan teknis, pelatihan berkelanjutan, dan desentralisasi akses pengguna.

5.2 Implikasi

5.2.1 Untuk Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi perlu merancang kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan kompetensi teknis di sektor publik, termasuk akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan penggunaan aplikasi pelaporan keuangan. Selain itu, dapat memperkuat peran pengabdian masyarakat melalui pelatihan atau pendampingan bagi BLUD.

5.2.2 Untuk Pemerintah

Perlu melakukan investasi berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM, termasuk pelatihan teknis akuntansi berbasis SAP, serta meningkatkan insentif bagi tenaga keuangan yang berprestasi dalam menyusun laporan yang berkualitas.

5.2.3 Untuk Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain yang mungkin memengaruhi kualitas laporan keuangan, seperti pengendalian internal, budaya organisasi, atau dukungan pimpinan, serta menguji model ini di sektor layanan publik lainnya seperti rumah sakit atau pendidikan.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penggunaan pendekatan *cross-sectional*, yang hanya menangkap data pada satu waktu tertentu, sehingga tidak dapat mengukur perubahan atau tren jangka panjang.
2. Keterbatasan teknis wawancara kualitatif, yang hanya melibatkan beberapa informan, sehingga belum mencerminkan keseluruhan pandangan dari semua unit kerja.
3. Fokus pada tiga variabel utama, yang menyisakan kemungkinan adanya variabel lain yang juga memengaruhi kualitas laporan keuangan namun belum dianalisis dalam model ini.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar instansi pengelola BLUD Puskesmas meningkatkan akuntabilitas tidak hanya secara administratif tetapi juga melalui pembentukan budaya kerja yang berorientasi pada tanggung jawab moral; memperkuat kompetensi Sumber Daya Manusia di bidang akuntansi pemerintahan dan penguasaan teknologi; serta mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi melalui pelatihan dan peningkatan infrastruktur. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan serta memperluas objek penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/jpbafm-07-2020-0098>.
- Al-Shaer, H. (2020). Sustainability reporting quality and post-audit financial reporting quality: Empirical evidence from the UK. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.2507>.
- Anggraini, R., Sari, D., & Prabowo, H. (2024). The Role of Technical Competence in the Effectiveness of Financial Reporting. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(1), 45–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jak.v12i1.1234>
- Anggraini, E. S. (2020). *Faktor-faktor determinan employee fraud: Peran whistleblowing intention sebagai mediator*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ann N. Mungai et al. (2024). Information Technology Capability, Managerial Ability, and Financial Reporting Quality: A Research Note. *J. Inf. Syst.*, 38, 99–121. <https://doi.org/10.2308/isys-2022-063>
- Armstrong, M. (2014). *Handbook of Human Resource Management Practice*. Kogan Page.
- Avishek Bhandari et al. (2021). Corporate Culture and Financial Reporting Quality. *Accounting Horizons*. <https://doi.org/10.2308/HORIZONS-19-003>
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2021). *Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Implementasi SIMDA dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. BPKP.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2023). *Asistensi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)*. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. <https://www.bpkp.go.id/id/produkLayanan/produk/OJ/asistensi-blud>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Keuangan Daerah 2023*. BPS.
- Boyatzis, R. E. (1982). *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. Wiley.
- BPKP. (2021). *Laporan Tahunan BPKP 2021*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Chugh, Y., Sharma, S., Mehndiratta, A., et al. (2024). Health care cost accounting in the Indian hospital sector. *Health Policy and Planning*, 39(7), 731–740.
- Hidayat, R. T., & Darmawan, R. A. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Berbasis Web Terhadap Peningkatan Penjualan Dan Rasio Keuangan Pada Umkm. *Jurnal Kewirausahaan, Akuntansi Dan Manajemen Tri Bisnis*, 3(2), 197–212. <https://doi.org/10.59806/tribisnis.v3i2.42>
- IAI. (2021). *Standar Akuntansi Keuangan*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- IFAC. (2022). *The Role of Professional Accountants in the Public Sector*. International Federation of Accountants.
- Ismawati, R., & Basuki, R. (2019). Konsep akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. . *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 7(2), 34–50.

- Jatmiko, B., & Irawan, D. (2020). Factors affecting regional government financial statements: Evidence from Indonesia. *Academic Journal of Accounting*.
- Javier García-Lacalle et al. (2021). Financial Reporting Quality and Online Disclosure Practices in Spanish Governmental Agencies. *Sustainability*. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/SU13052437>
- John L. Abernathy et al. (2023). Does greater access to employees with information technology capability improve financial reporting quality? *Contemporary Accounting Research*. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12869>
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Khoirunnisa, A., & Wijaya, T. (2023). *Analisis Pengaruh E-Service Quality dan Trust Terhadap Minat Penggunaan LinkAja Syariah sebagai Dompot Digital (Studi pada Mahasiswa FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta)*. IAIN Surakarta.
- Kihuba, E., et al. (2016). Development of a hospital costing method in Kenya: the first step to cost-accounting for universal health coverage. *BMC Health Services Research*, 16, 407.
- Kurnia Sari Aziza. (2015). Ini Penjelasan BPK soal Opini WDP yang Diterima Pemprov DKI. *Kompas.Com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/07/16500771/Ini.Penjelasan.BPK.soal.Opini.WDP.yang.Diterima.Pemprov.DKI>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Revisi*. Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit JKL.
- Maria, F., dkk. (2020). Kompetensi aparatur pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Manajemen Publik*, 5(1), 23–37.
- Mariska, R. Y. (2024). *Pengaruh literasi ekonomi, layanan dompet digital, layanan paylater, dan mental accounting terhadap perilaku konsumtif siswa [Institut Teknologi dan Sains Mandala]*. https://repo.itsm.ac.id/1292/2/SKRIPSI_FIX_BENDEL_REVI_YULI_MARISKA.pdf
- McClelland, D. C. (1973). Testing for Competence Rather Than for Intelligence. *American Psychologist*, 28(1), 1–14. <https://doi.org/10.1037/h0032720>
- Monica, S. G., Saerang, D. P. E., & Pangerapan, S. (2017). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 304–316. <https://doi.org/10.32400/gc.12.2.17683.2017>
- Musiega, A., Tsofa, B., Mugo, P.M., et al. (2024). Evaluating the effectiveness of the National Health Insurance Subsidy Programme within Kenya's universal health coverage initiative: a study protocol. *BMJ Open*, 14(11), e083971.
- Nasution, D. A. D. (2019). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Pemda Kota Metro. (2023). *Laporan Keuangan Daerah Kota Metro Tahun 2023*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79

- Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah. *World Development*, 1(1), 1–53.
- Pratama, S. Y. (2017). Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda) Pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, 4(2), 153.
<https://doi.org/10.52239/jar.v4i2.600>
- Purba, R., & Amrul, I. (2018). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(3), 132–147.
- Purnama, S., & Nadirsyah, T. (2016). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(2), 87–101.
- Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 54, 100634.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634>
- Reni Susanti, K. (2019). Tiga daerah di Jabar gagal raih opini Wajar Tanpa Pengecualian. *Kompas.Com*.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2022). *Accounting Information Systems (15th ed.)*. Pearson.
- S. Muraina et al. (2020). Effects of implementation of International Public Sector Accounting Standards on Nigeria's financial reporting quality. *International Journal of Public Sector Management*, 33, 323–338.
<https://doi.org/10.1108/ijpsm-12-2018-0277>.
- Sari, M. P., Ardiansari, A., Pujiati, A., & ... (2020). Improvisasi Sistem Pelaporan Keuangan dan Transformasi Bisnis Online dalam Peningkatan Market Share KnK Koffee Resources pada Era New Normal. *Seminar Nasional*
<http://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/view/349%0Ahttps://proceedings.undip.ac.id/index.php/semnasppm2019/article/download/349/221>
- Shafwan, S., Nadirsyah, N., & Ridwan, R. (2023). The Influence of Accounting Information Systems on Financial Reporting Quality. *International Journal of Social Humanities*, 2(7), 73–85.
- SIMDA. (2019). *Buku Manual Sistem dan Prosedur SIMDA*. BPKP.
- Spencer, L. M., & Spencer, S. M. (1993). *Competence at Work: Models for Superior Performance*. John Wiley & Sons.
- Susena, I., & Supadmi, N. (2020). Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Kualitas Laporan Keuangan. *European Journal of Anaesthesiology*, 30, 584.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p03>.
- Teoh, S. Y., Dias, M., Vesty, G., Jansson, M., Rana, T., & Butler-Henderson, K. (2024). Health information systems in value-based healthcare. In *Accounting for value-based health systems (Bab 4)*. Routledge.
<https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781032685489-4>
- Torres, L., & Garcia-Lacalle, J. (2021). Financial reporting quality and online disclosure practices in spanish governmental agencies. *Sustainability (Switzerland)*, 13(5), 1–21. <https://doi.org/10.3390/su13052437>
- Tran, Y., Nguyen, N., & Hoang, T. (2020). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of*

- Accounting and Public Policy*, 106801.
<https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>.
- Turner, L., Weickgenannt, A., & Copeland, M. K. (2017). *Accounting Information Systems: Controls and Processes (3rd ed.)*. Wiley.
- Wiguna, A., & Dwilingga, A. (2020). Hak Publik dan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 45–61.
- Y. Tran et al. (2020). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. *Journal of Accounting and Public Policy*, 106801. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801>.
- Y. Tran et al. (2021). Effects of leadership and accounting capacity on accountability through the quality of financial reporting by public organisations in Vietnam. *Journal of Asia Business Studies*.
<https://doi.org/10.1108/JABS-02-2020-0077>.
- Yunita, N., Noor, I., & Suherman, A. (2023). The Effect of SIMDA Implementation on Financial Report Quality. *Journal of Management and Economics*, 2(2), 1–12.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37676/jmea.v2i2.261>